



**STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BANYUWANGI UTARA
DALAM MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI PERIODE 2010-2015**

*Implementation Strategy of Sustainable Forest Management System Forest
Management Unit (FMU) of North Banyuwangi in Realizing Sustainable Forest
Period 2010-2015*

SKRIPSI

Oleh

Indah Citra Purnama

NIM 100910201025

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BANYUWANGI UTARA
DALAM MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI PERIODE 2010-2015**

*Implementation Strategy of Sustainable Forest Management System Forest
Management Unit (FMU) of North Banyuwangi in Realizing Sustainable Forest
Period 2010-2015*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar sarjana

Oleh

Indah Citra Purnama

NIM 100910201025

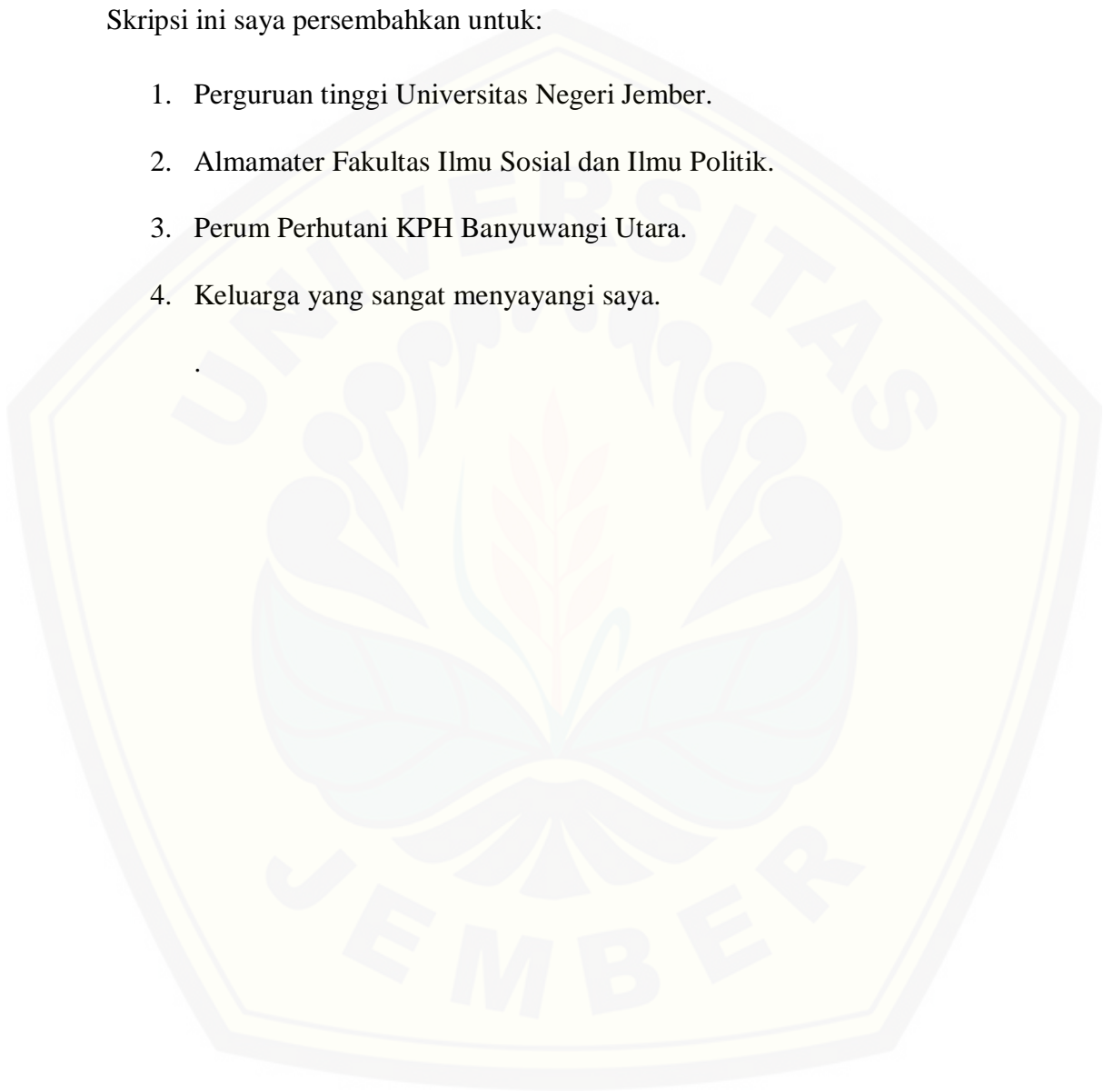
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Perguruan tinggi Universitas Negeri Jember.
2. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.
4. Keluarga yang sangat menyayangi saya.



MOTO

Mulailah dengan melakukan apa yang penting, kemudian apa yang mungkin, dan tanpa terasa anda telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin.

(ST. Francis Of Assisi)*

Tidak ada yang dapat menggantikan ketekunan. Tidak juga dengan bakat: Tidak ada yang luar biasa dari orang yang berbakat tetapi gagal. Tidak juga dengan jenius: Jenius tanpa realisasi hanyalah merupakan pepatah. Pendidikan pun tidak: Dunia ini penuh dengan orang-orang terdidik yang ditinggalkan. Hanya ketekunan dan tekad yang dapat mencapai segalanya.

(Calvin Coolidge)*

*) Khera,S. 2002. *Kiat Menjadi Pemenang (Terjemahan, Judul Asli: You Can Win)*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Indah Citra Purnama

NIM : 100910201025

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2016

Yang Menyatakan,

Indah Citra Purnama
NIM 100910201025

SKRIPSI

**STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BANYUWANGI UTARA
DALAM MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI PERIODE 2010-2015**

*Implementation Strategy of Sustainable Forest Management System Forest
Management Unit (FMU) of North Banyuwangi in Realizing Sustainable Forest
Period 2010-2015*

Oleh

Indah Citra Purnama

NIM 100910201025

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Mei 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji;

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Anggota Tim Penguji;

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP. 197410072000121001
2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015; Indah Citra Purnama, 100910201025; 2016:121 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hutan Lestari adalah hutan yang sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan generasi masa depan. Konsep kelestarian hutan hadir pertama dari keprihatinan dunia tentang masalah lingkungan global karena bertambah parahnya kerusakan lingkungan oleh ulah manusia yang tidak terkendali. Oleh karena itu dibutuhkan kelestarian alam. Dalam konsep hutan lestari melibatkan tiga aspek penting dalam pengelolaannya, terdiri dari fungsi sosial, fungsi produksi atau ekonomi, dan fungsi lingkungan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hutan lestari harus dapat melaksanakan ketiga konsep tersebut secara baik agar memberikan manfaat positif bagi pelaksana dan masyarakat luas.

Indonesia merupakan negara pemilik hutan "warisan" di daerah katulistiwa sebagai paru-paru dunia, sekaligus merupakan salah satu dari empat negara yang punya flora dan fauna terbesar di dunia, ikut andil besar dalam melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Untuk itu dibutuhkan cara dalam melaksanakannya. Salah satu cara dalam mewujudkan hutan lestari ialah dengan memberikan atau membuat strategi yang dapat menunjang kelestarian hutan. Salah satu KPH yang dianggap telah menjalankan strategi dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian hutan adalah KPH Banyuwangi Utara. Hal tersebut terbukti dengan diperolehnya sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diakui oleh dunia internasional pada tahun 2013 lalu hingga saat ini. Salah satu strateginya ialah penerapan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan. Maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan

Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015.

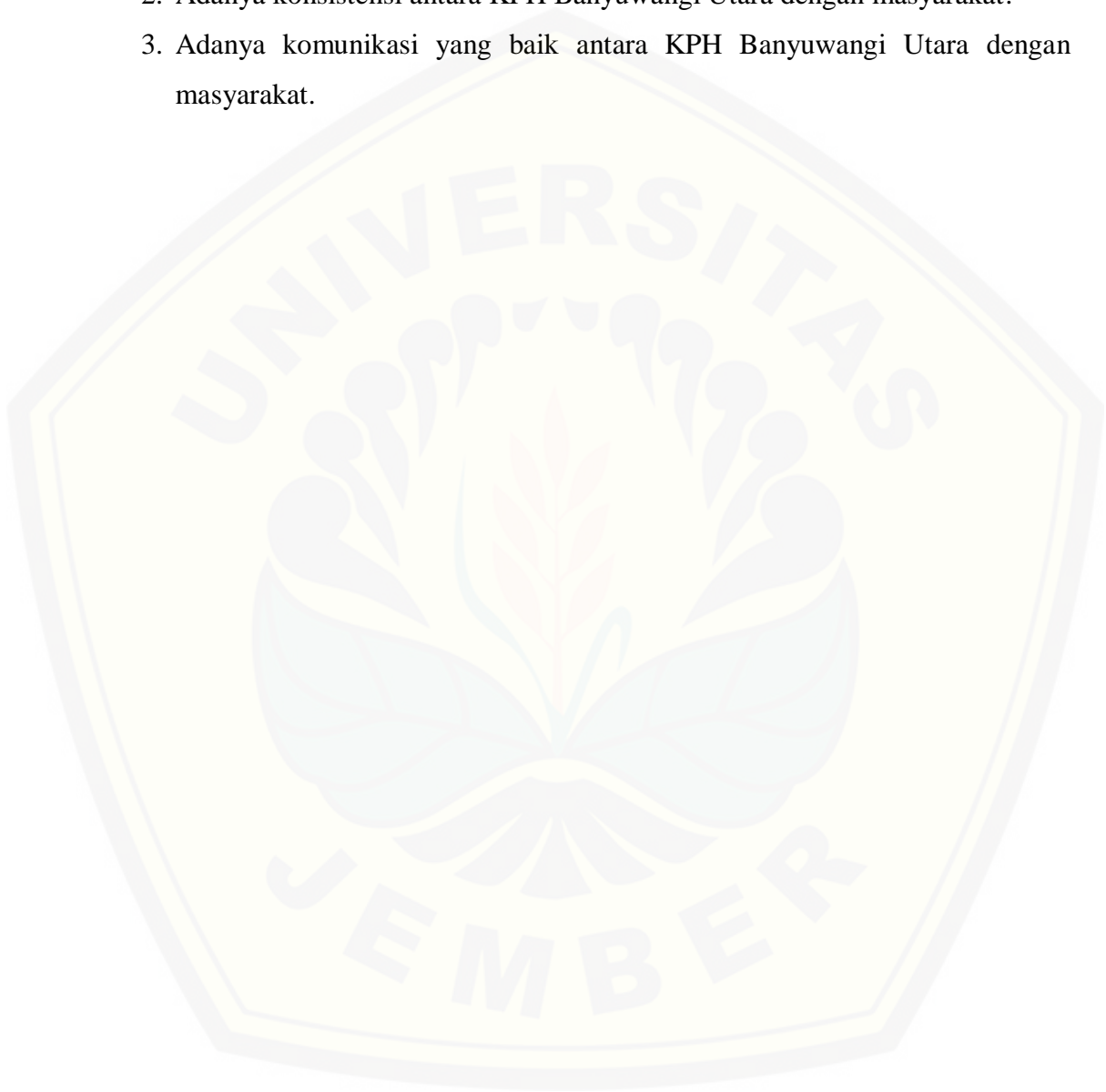
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, dalam mengetahui strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Bogdan & Taylor (dalam Gunawan 2013:82) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. KPH Banyuwangi Utara merupakan wilayah percontohan yang baik untuk Perum Perhutani pada KPH lainnya karena dianggap mampu mewujudkan hutan lestari di wilayahnya. Untuk itu penting untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari. Penerapan pengelolaan hutan lestari bagaimana yang dimaksud itu ialah sesuai dengan standar pengelolaan FSC. Pada hal ini peneliti memfokuskan bahan kajiannya pada periode tertentu yaitu periode 2010-2015 dikarenakan pada periode tersebut KPH Banyuwangi Utara dalam perjalanannya menuju predikat hutan lestari dan telah mendapatkan predikat hutan lestari dengan satu periode kepemimpinan.

System pengelolaan hutan lestari standar FSC meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi kelola kelestarian produksi, fungsi kelola kelestarian sosial, dan fungsi kelola kelestarian lingkungan. Strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC dilakukan pada periode 2010-2015 berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang kurun waktu lima tahun. Untuk

mencapai keberhasilannya dalam mewujudkan hutan lestari maka KPH Banyuwangi Utara melakukan cara-cara sebagai berikut.

1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan.
2. Adanya konsistensi antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.
3. Adanya komunikasi yang baik antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya dalam penulisan skripsi ini.
2. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Pembimbing Akademik yang telah sudi membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Perum Perhutani KPH Banyuwangi beserta jajarannya yang telah bersedia menerima penulis dalam melaksanakan penelitiannya.
4. Keluarga yang sangat aku sayangi, Bapak, Ibu, Ayah, Kakak, yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-temanku Anita, Rika, Nike, Selvi, Lely, Ferdy, Alex, Ian yang telah berbagi keceriaan juga telah memberikan semangat berjuang.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| PENGESAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| PRAKATA | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 15 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Paradigma Administrasi Negara | |
| Tentang Pengelolaan Hutan Lestari | 17 |
| 2.2 Strategi..... | 22 |
| 2.3 Partisipasi Masyarakat | 26 |
| 2.4 Konsep Hutan Lestari | 29 |
| 2.4.1 Kelestarian Fungsi Produksi | 34 |
| 2.4.2 Kelestarian Fungsi Sosial | 35 |
| 2.4.3 Kelestarian Fungsi Lingkungan | 41 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 2.8 Penelitian Terdahulu | 43 |
| 2.9 Kerangka Konseptual | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|-----------|
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 46 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 47 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 48 |
| 3.4 Teknik Penentuan Informan | 48 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| 3.6 Teknik Keabsahan data | 56 |
| 3.7 Analisis Data | 59 |
| 3.7.1 Reduksi Data | 59 |
| 3.7.2 Penyajian Data | 60 |
| 3.7.3 Menarik Kesimpulan | 61 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian KPH Banyuwangi Utara | 62 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah KPH Banyuwangi Utara | 62 |
| 4.1.2 Sejarah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara | 63 |
| 4.1.3 Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara | 64 |
| 4.1.4 Visi dan Misi KPH Banyuwangi Utara | 67 |
| 4.1.5 Tujuan Perusahaan KPH Banyuwangi Utara | 67 |
| 4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi KPH Banyuwangi Utara | 68 |
| 4.1.7 Struktur Organisasi KPH Banyuwangi Utara | 70 |

| | |
|--|------------|
| 4.2 Hasil Penelitian Mengenai Strategi KPH Banyuwangi Utara | |
| Dalam Mewujudkan Hutan Lestari | 73 |
| 4.3.1 Fungsi Kelestarian Produksi..... | 78 |
| 4.3.2 Fungsi Kelestarian Sosial | 82 |
| 4.3.3 Fungsi Kelestarian Lingkungan | 84 |
| 4.3 Hasil Analisis Mengenai Strategi KPH Banyuwangi Utara | |
| Dalam Mewujudkan Hutan Lestari | 86 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan | 101 |
| 5.2 Saran | 101 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Penjarahan yang terjadi di KPH Banyuwangi Utara | 10 |
| 1.2 Hasil pengamanan KPH Banyuwangi Utara | 11 |
| 1.3 Wilayah kecamatan KPH Banyuwangi Utara | 12 |
| 1.4 Strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara | 13 |
| 3.1 Daftar informan wawancara KPH Banyuwangi Utara | 51 |
| 4.3 Pengaturan Tebangan dan Penanaman 8 (delapan) Jangka KPH Banyuwangi Utara | 95 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada agenda besar pembangunan yang disepakati PBB yang kemudian dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDG'S) 1990-2015 salah satu butirnya yaitu *Ensure Environmental Sustainability* (Menjamin Keberlanjutan Lingkungan) memberikan opini bahwa isu lingkungan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan menjadi sangat penting untuk diperhatikan keberlangsungannya karena menyangkut keseimbangan alam. Hutan menjadi topik hangat untuk diangkat karena dianggap memberikan peran besar dalam menjaga ekosistem. Hutan sebagai paru-paru dunia menunjukkan bahwa hutan sangat memiliki peran kuat kepada manusia yakni publik dimana kebutuhan dapat tercukupi dengan adanya manfaat hutan, namun di balik itu semua ada kemungkinan-kemungkinan tangan-tangan “jahil” yang mencoba untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan akibat kerusakan. Sudah sangat jelas bahwa hutan juga termasuk dalam masalah publik yang perlu diperhatikan juga dilestarikan serta dengan melakukan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini pemerintah berhak mengatur tata kehidupan nasional dengan berbagai seginya, termasuk dalam isu-isu lingkungan.

Pengakuan atas legitimasi pemerintah untuk mengatur berbagai segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan kemampuannya memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok kepentingan dimasyarakat yang diperintahnya. Legitimasi demikian akan sangat besar peranannya dalam meningkatkan kemampuan menganalisis dan merumuskan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat menerima kebijaksanaan itu sebagai sesuatu yang memang diperlukan demi kepentingan bersama secara nasional (Siagian, 1986:119). Jelas kiranya bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan

sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.

Dampak lingkungan mempengaruhi semua segi kehidupan dan penghidupan berorganisasi, bermasyarakat dan bernegara, secara implisit hal itu berarti bahwa pemerintah beserta seluruh jajaran aparatnya tidak luput dari dampak perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Aparatur pemerintah mutlak perlu memperhitungkan dampak perubahan lingkungan yang terjadi dalam merumuskan kebijaksanaan dan strategi. Menjadi jelas bahwa pemerintah dengan segala aparturnya memainkan dua peranan penting sepanjang menyangkut perubahan lingkungan, yaitu sebagai penyebab terjadinya perubahan tertentu melalui berbagai kebijaksanaan dan strateginya terutama melalui wewenang pengaturan yang dimilikinya, dan sebagai objek dari perubahan yang terjadi untuk mana ia harus memberikan tanggapan (Siagian, 1986:133). Keberlangsungan hutan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun diusahakan, memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Tingginya angka kerusakan hutan menjadi perhatian seluruh dunia untuk bersama-sama mencari solusi yang baik bagi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi serta memperbaikinya. Hutan bukan hanya berpengaruh pada satu kawasan itu saja melainkan dapat mempengaruhi kawasan seluruh dunia. Begitu besarnya manfaat hutan serta dampak yang ditimbulkan akan kerusakannya memberikan gambaran kepada dunia akan nasibnya kedepan. Di Negara Indonesia sendiri tingginya tingkat kerusakan hutan menjadi sorotan serius dikarenakan Indonesia adalah Negara tropis dengan hutan terbesar nomor tiga di dunia. Dijelaskan dalam Hidayat, H. (2015:12) luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta hektar (ha). Banyak pihak menyebutkan sebagian luas hutan itu sudah mengalami degradasi dan deforestasi sehingga luas yang tersisa sebenarnya sekutar 75% atau 90 juta ha. Perkiraan itu tidak berbeda jauh dengan hasil pengamatan satelit Landsat 7 ETM Tahun 2003 yang mencatat luas tutupan hutan Indonesia hanya

sekitar 93.924.330 ha. Menurut Greepeace, secara keseluruhan Indonesia sudah kehilangan lebih 72% dari hutan alam utuhnya dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur. Penebangan besar-besaran dalam skala industri dan oprasi pembalakan yang tak terhitung jumlahnya berkontribusi terhadap kerusakan itu. Mantan Menteri Kehutanan Indonesia, Malam Sambat (MS) Kaban menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam periode 2000-2005, laju kerusakan hutan diperkirakan antara 1,9 juta sampai 2,8 juta ha, mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 41 triliun setiap tahunnya.

Mulailah muncul konsep pembangunan berkelanjutan dimana pengelolaan sumberdaya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek yakni ekonomi, ekologi dan sosial yang kemudian hal tersebut diadopsi kedalam bidang kehutanan yang saat ini dikenal dengan konsep kelestarian hutan. Kosep kelestarian hutan hadir pertama dari keprihatinan dunia tentang masalah lingkungan global karena bertambah parahnya kerusakan lingkungan oleh ulah manusia yang tidak terkendali yang mulai disadari sejak tahun 1970-an. Tahun 1972 PBB melakukan Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama di Stockholm, Swedia yang dikenal dengan *United Nations Conference on Human Environment*. Motto konferensi, *Only One Earth* (Hanya Satu Bumi) untuk semua manusia, sekaligus menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan melahirkan gagasan besar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di Indonesia dalam persiapannya tumbuh pengertian bahwa di negara sedang berkembang masalah lingkungan hidup justru timbul karena kurangnya pembangunan. Lahirlah konsep *eco-development* yang di Indonesia dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, pembangunan diperlukan dan harus dilaksanakan. Tetapi pembangunan itu tak boleh merusak lingkungan hidup. Setelah sepuluh tahun konferensi Stockholm berselang, PBB kembali menggelar konferensi tentang lingkungan hidup pada tahun 1982 di Nairobi, Kenya. Pembangunan berkelanjutan pertama kali didefinisikan tahun 1987 oleh Komisi Dunia pada Lingkungan dan Pembangunan, ketua oleh Gro Harlem Bruntland, yang merupakan Perdana Menteri Norwegia pada saat itu.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini dengan mengkompromikan kemampuan generasi yang akan datang menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini berarti, pembangunan kita harus selalu memperhatikan kebutuhan anak-cucu. Sumber daya tidak boleh dihabiskan. Tidak boleh mewariskan lingkungan hidup yang rusak. Rusaknya hutan mengakibatkan banjir dalam musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau serta laju erosi tanah yang tinggi yang menurunkan kesuburan tanah. Kemudian pada tahun 1992 di Rio de Janeiro dibawah prakarsa PBB diadakan konferensi UNCED (*United Nation Cobference on Environment and Development*) yang dikenal dengan KTT Bumi atau KTT Rio. Dan yang menjadi fokus sorotan adalah sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di masing-masing negara dan di tingkat global pasca-Rio de Janeiro. Negara-negara berkembang banyak menjadi sorotan. Indonesia merupakan negara pemilik hutan "warisan" di daerah katulistiwa sebagai paru-paru dunia, sekaligus merupakan salah satu dari empat negara yang punya flora dan fauna terbesar di dunia, di samping Brasil, Kolumbia, dan Meksiko, tentu memiliki suara "emas" yang layak didengar atau sangat ditunggu negara-negara lain setiap kali dunia mempersoalkan masalah lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi awal lahirnya konsep hutan lestari.

Memandang pentingnya keberadaan hutan maka Pemerintah Indonesia menugaskan Perhutani selaku Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang menangani pengelolaan hutan yang ada di Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (11) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian, masih pada Undang-Undang yang sama dijelaskan pada Pasal 2 penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,

keadilan,kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Selanjutnya, pada Pasal 10 dijelaskan sebagai berikut.

- (1). Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2). Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a. perencanaan kehutanan,
 - b. pengelolaan hutan,
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan,dan
 - d. pengawasan.

Saat ini konsep hutan lestari banyak mendapatkan perhatian dikarenakan masyarakat mulai peduli akan lingkungan. Dalam konsep hutan lestari melibatkan tiga aspek penting dalam pengelolaannya, terdiri dari fungsi sosial, fungsi produksi atau ekonomi, dan fungsi lingkungan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan hutan lestari harus dapat melaksanakan ketiga konsep tersebut secara baik agar memberikan manfaat positif bagi pelaksana dan masyarakat luas. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sekitar hutan juga memiliki peran yang penting dalam melindungi sumberdaya hutan agar manfaatnya dapat dinikmati secara terus-menerus hingga generasi-generasi berikutnya.

Zulkifli seorang konsultan lingkungan dan energi dalam artikelnya mengenai manajemen pengelolaan hutan lestari, menjelaskan bahwa ada beberapa isu penting yang berkaitan dengan sumber daya hutan berhubungan dengan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam program pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan, yaitu sebagai berikut.

1. Semakin luasnya hutan yang rusak.
2. Besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain.

3. Sumber daya hutan kurang memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pelestarian sumber daya hutan.
6. Kurangnya kepedulian dan kemampuan multipihak dalam pelestarian sumber daya hutan.
7. Rendahnya kecocokan terhadap eksistensi tata ruang kawasan hutan.

Berdasarkan isu-isu yang telah digambarkan tersebut maka sekiranya diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperbaikinya. Perlunya pengelolaan hutan yang baik dengan konsep lestari agar kelangsungan hutan maupun lingkungan dapat terus berlangsung dan dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Pengelolaan hutan lestari harus dilakukan melihat kondisi lingkungan saat ini semakin tereksplorasi secara berlebihan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian, dan bila itu terus berlanjut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Salah satu cara dalam mewujudkan hutan lestari ialah dengan memberikan atau membuat strategi-strategi yang dapat menunjang kelestarian hutan. Dalam hal ini pembuat kebijakan pada tingkat atas dapat memberikan instruksinya kepada jajaran di bawahnya yaitu pada tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) untuk dapat menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Suatu perencanaan perlu dilakukan oleh organisasi kehutanan yakni Perhutani selaku pihak yang diberi wewenang untuk mengelola hutan yang ada didaerahnya untuk mengarah kepada kelestarian hutan. Dalam hal ini diperlukannya Sumberdaya Manusia yang mumpuni dibidangnya untuk menjalankan program dengan baik serta mampu mengembangkan organisasinya menuju tujuan-tujuan organisasi yang telah ditargetkan. Sumberdaya manusia yang baik harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menjalankan tugasnya serta mampu bertahan ditengah persaingan yang semakin besar. Sumberdaya manusia dalam organisasi di sini yaitu Perhutani

harus memiliki rencana-rencana besar dan harus memiliki strategi untuk menjalankan program-program yang telah ditentukan.

Membahas mengenai hutan lestari menjadi sangat menarik karena didalamnya melibatkan peran pemerintah yakni Perum Perhutani selaku pemilik kewenangan tentang hutan, juga melibatkan pihak swasta sebagai pihak untuk mengembangkan hasil produksi, serta masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Ketiga pemangku kepentingan ini sangat berkaitan erat dan berpengaruh dalam pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi yakni mewujudkan hutan lestari.

Di Indonesia sendiri upaya-upaya terus dilakukan untuk dapat mewujudkan hutan lestari sebagai komitmennya dalam meningkatkan nilai-nilai positif dari hutan yang berpengaruh besar bagi plasma nutfah pada alam. Saat ini terdapat tujuh unit manajemen Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani yang telah mengantongi sertifikat *sustainable forest management standar Forest Stewardship Council (FSC)* yaitu lembaga sertifikasi dunia yang didirikan tahun 1993, sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) dengan misi untuk mempromosikan pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi. Ketujuh KPH tersebut diantaranya, KPH Madiun, KPH Banyuwangi Utara, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Kebonharjo, KPH Kendal dan KPH Ciamis. Dengan mendapatkan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa KPH tersebut mampu melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan merupakan sebuah kebanggaan dari usaha yang telah dilakukan setiap KPH.

Dari gambaran yang telah diberikan dalam hal ini peneliti merasa sangat penting untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi dalam mewujudkan hutan lestari. Pada penelitian ini, peneliti mengambil tema hutan lestari sebagai bahan kajiannya, dan peneliti meneliti strategi dalam mewujudkan hutan lestari dengan menentukan penelitian di daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 578.250 Ha atau 5.782,50 Km² dan luas kawasan hutannya 183.396,34 Ha (31,72%) terdiri sebagai berikut.

1. Hutan Lindung 38.103,56 Ha.
2. Hutan Produksi 79.851,53 Ha.

Besarnya luas kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi sehingga membaginya menjadi 3 kawasan hutan yaitu sebagai berikut.

1. KPH Banyuwangi Selatan.
2. KPH Banyuwangi Barat.
3. KPH Banyuwangi Utara.

Dari ketiga kawasan tersebut peneliti memilih KPH yang telah berhasil mewujudkan hutan lestari di kawasan hutannya sebagai bahan kajiannya yakni pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara, Perum Perhutani Unit II Propinsi Jawa Timur.

Proses perjalanan KPH Banyuwangi Utara dalam mendapatkan sertifikasi dimulai pada tahun 1990 Perhutani merupakan perusahaan pertama di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional dengan penghargaan “*Certificate of Rain Forest Alliance for Sustainable Forest Management*” dari Smartwood Forest Alliance Amerika untuk kawasan hutan di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 2002 sertifikat tersebut dicabut menyusul adanya penjarahan hutan pasca reformasi, di mana perhutani kehilangan hutan 500 ribu Ha dari total 2,4 juta Ha. Namun sebagai bagian dari hutan dunia, perhutani berkomitmen untuk melakukan serifikat ulang yaitu dengan membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi berdasarkan Keputusan Direksi no. 614/Kpts/Dir/2002 pada September 2002 dan dikuatkan dengan Keputusan Direksi Nomor 430/Kpts/Dir/2003. Kelompok kerja melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk proses sertifikasi yang ada di lapangan. Berdasarkan Visi Perusahaan, Manajemen Perhutani berkomitmen untuk memperoleh kembali sertifikat SFM standar FSC untuk seluruh unit *forest management* pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan kinerja pengelolaan hutan lestari, pada bulan Maret 2005 dilaksanakan Baseline Appraisal oleh WWF dan Direksi Perum Perhutani, selanjutnya dilaksanakan pencanangan Sertifikasi PHL (pengelolaan hutan lestari) di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur pada 5

KPH (Bojonegoro, Jatirogo, Saradan, Madiun, dan Banyuwangi Utara) sesuai Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 258/041.5/Prod/II tanggal 19 September 2005. Selama tahun 2006-2008 dilakukan pendampingan proses internalisasi prinsip-prinsip/standar FSC oleh WWF dimulai di wilayah KPH Banyuwangi Utara berdasarkan surat Direksi Perum Perhutani No: 177/006.6/Prod/IV/Dir tanggal 13 April 2006. Selama proses tersebut dilaksanakan persiapan menuju main assessment antara lain menyangkut penataan SOP, SDM, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan implementasi operasional. Proses pendampingan oleh WWF di KPH Banyuwangi Utara hanya sampai pada Tahun 2010. KPH Banyuwangi Utara mengikuti program sertifikasi pada tahun 2006 dikarenakan KPH Banyuwangi Utara dianggap telah menerapkan konsep hutan lestari di wilayahnya, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya sertifikat pengelolaan hutan lestari yang diakui oleh dunia internasional pada tahun 2013 lalu hingga saat ini (Majalah Prima Rimba dalam www.issuu.com diakses pada 4 Mei 2015 pukul 10.35).

Kepala Perhutani KPH Banyuwangi Utara Bapak Ir. Artanto dalam wawancara di kantornya mengungkapkan bahwa KPH Banyuwangi Utara dahulu juga terkena dampak dari penjarahan akan tetapi nilainya tidak terlalu signifikan, sehingga perhutani memilih KPH Banyuwangi untuk mengikuti proses sertifikasi. Hal tersebut sesuai pada data yang ada menjelaskan kinerja Perhutani Banyuwangi Utara semakin baik dalam menjaga hutannya dengan pengelolaan yang apik. Terlihat pada data Tahun 2003 hingga Tahun 2012, penurunan jumlah penjarahan yang semakin sedikit.

Tabel 1.1 Penjarahan yang terjadi di KPH Banyuwangi Utara

| TAHUN | PENCURIAN POHON | |
|-------|-----------------|----------------------|
| | TUNGGAK (BUAH) | KERUGIAN (Rp.x 1000) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2003 | 2.031 | 480.274 |
| 2004 | 2.263 | 797.455 |
| 2005 | 1.869 | 753.503 |
| 2006 | 1.103 | 397.591 |
| 2007 | 708 | 293.710 |
| 2008 | 350 | 136.344 |
| 2009 | 272 | 89.984 |
| 2010 | 136 | 70.180 |
| 2011 | 161 | 220.485 |
| 2012 | 35 | 76.369 |

Keterangan: penjarahan hutan di KPH Banyuwangi Utara periode 2003-2012.

Sumber: Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara jangka waktu 2013-2022.

Pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penjarahan yang terjadi di KPH Banyuwangi Utara terus-menerus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen KPH Banyuwangi Utara dalam menjaga hutannya dari bahaya penjarahan. KPH Banyuwangi Utara terus-menerus melakukan perbaikan dalam organisasinya semata-mata untuk mencapai sasaran utamanya yaitu mewujudkan hutan lestari.

KPH Banyuwangi Utara terus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya dalam komitmennya menjaga hutan. Hal tersebut dibuktikan dari data-data lanjutan yaitu hasil pengamanan dari sidak yang dilakukan KPH Banyuwangi Utara yang terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Hasil pengamanan KPH Banyuwangi Utara

| TAHUN | HASIL PENGAMANAN (m ³) | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | SISA PENCURIAN | TEMUAN | TANGKAPAN | PENGELEDAHAN |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 621,9488 | 315,7332 | 40,2233 | 74,375 |
| 2004 | 713,0939 | 270,6323 | 30,5500 | 25,6829 |
| 2005 | 770,2783 | 238,6036 | 35,7288 | 36,7603 |
| 2006 | 344,8481 | 127,9960 | 21,3828 | 17,5925 |
| 2007 | 173,6133 | 157,3967 | 11,7849 | 24,6684 |
| 2008 | 76,5055 | 87,4904 | 10,5343 | 20,5686 |
| 2009 | 52,0933 | 49,5609 | 2,0511 | 1,3746 |
| 2010 | 12,5410 | 21,4375 | 20,1765 | 6,7848 |
| 2011 | 16,3970 | 10,7650 | 6,2202 | 0,7435 |
| 2012 | 3,8320 | 8,8941 | 0,5578 | 1,5493 |
| JUMLAH | 2795,1512 | 1288,5117 | 179,2097 | 210,0999 |

Keterangan: hasil pengamanan di KPH Banyuwangi Utara periode 2003-2012.

Sumber: Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara jangka waktu 2013-2022.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata hasil pengamanan yang didapat oleh KPH Banyuwangi Utara mengalami penurunan secara terus-menerus. KPH Banyuwangi berupaya terus-menerus melakukan yang terbaik bagi kelangsungan organisasinya serta manfaatnya bagi masyarakat.

Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara, adalah sebuah perusahaan umum kehutanan negara yang memiliki kawasan hutan seluas 56.118,98 Ha, yaitu sebagai berikut.

1. Hutan Produksi Jati seluas 26.300,218 Ha
2. Hutan Produksi Non Jati seluas 1.822,027 Ha
3. Hutan Lindung seluas 1.678,500 Ha
4. Kawasan Perlindungan dan tidak produktif 26.318,232 Ha

Kawasan tersebut terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan selanjutnya dibentuk dalam beberapa Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH).

Tabel 1.3 Wilayah kecamatan KPH Banyuwangi Utara

| Kecamatan | B K P H |
|------------|----------------------|
| Kalipuro | Ketapang |
| Wongsorejo | Watudodol, Bajulmati |
| Banyuputih | Bajulmati, Asembagus |

Sumber: kphbanyuwangiutara.com (data diakses pada 22 desember 2015)

Dijelaskan oleh Bapak Januar seorang staf bidang lingkungan (dalam wawancara 10 Juni 2015) bahwa luas dan batas wilayah KPH Banyuwangi tidak pernah mengalami perubahan atau tetap dari tahun ke tahun. KPH Banyuwangi Utara pernah mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan kawasan hutan yang terjadi pada tahun 2009-2011 di petak 66 h BKPH Ketapang antara perum perhutani KPH Banyuwangi Utara dengan John Robert Andreas, dimana proses hukum pada tahun 2011 Perum Perhutani melakukan banding ke Mahkamah Agung yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.

Peneliti mengambil penelitian pada daerah Kabupaten Banyuwangi yakni pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara, dikarenakan pada KPH Banyuwangi Utara dinilai sudah berhasil menerapkan konsep hutan lestari dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menanam pohon serta mampu menggerakkan masyarakat pada kegiatan pelestarian hutan. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatnya penghargaan sebagai juara terbaik II Lomba Wana Lestari tingkat nasional tahun 2014 serta pada tahun 2013, Perum Perhutani mendapatkan Sertifikat FSC untuk KPH Banyuwangi Utara. *Forest Stewardship Council* (FSC) adalah sebuah organisasi yang independen, nirlaba, non pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan hutan-hutan dunia yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi dengan membawa visi hutan-hutan dunia dapat memenuhi hak-hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dengan adanya sertifikat FSC tersebut sebagai bukti menunjukkan bahwa KPH Banyuwangi Utara telah melakukan pengelolaan hutan yang baik dengan lingkungannya untuk mewujudkan hutan secara lestari yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.

KPH Banyuwangi Utara merupakan wilayah percontohan yang baik untuk Perum Perhutani pada KPH lainnya karena dianggap mampu mewujudkan hutan lestari di wilayahnya. Dalam mencapai prestasinya yang telah digambarkan oleh peneliti tentunya banyak strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara yang telah dibuat dan telah dilaksanakan. Kesemua strategi-strategi tersebut dibuat untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara periode 2010-2015

| No | Bidang | Strategi |
|----|---|---|
| 1 | Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku dengan memperhitungkan kajian kelestarian sumberdaya hutan. 2. Menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC. 3. Penyelesaian permasalahan kawasan dengan pihak ke-3 secara terpadu. |
| 2 | Pembinaan dan Konservasi Sumberdaya Hutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sumber benih baru hasil rekayasa puslitbang. 2. Pemeliharaan sumber benih yang ada. 3. Pemenuhan benih dari sumber benih yang ada baik secara kuantitas dan kualitas. 4. Standarisasi biaya pembinaan dan konservasi (pembibitan, tanaman, pemeliharaan). 5. Tanah kosong selesai reboisasi Tahun 2010. 6. Pengembangan jati yang bernilai ekonomis tinggi. 7. Mobilisasi tenaga terlatih untuk mensukseskan tanaman guna mewujudkan program Perhutani Hijau Tahun 2010. 8. Meningkatkan peran serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan. |
| 3 | Perlindungan Sumberdaya Hutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan. 2. Memberdayakan sumberdaya internal bidang humas. 3. Mengoptimalkan peran dan fungsi petugas lapangan dalam penguasaan wilayah kerjanya dan mengantisipasi permasalahan sedini mungkin. 4. Pemberlakuan <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> petugas lapangan. 5. Mengoptimalkan peran polisi hutan dalam rangka pembinaan |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| | | dan monitoring kawasan hutan. |
| 4 | Produksi Hasil Hutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan efisiensi produksi kayu. 2. Penebangan selektif pada rimba bernilai ekonomi tinggi. 3. Minimalisasi produk rusak karena pecah banting atau salah ukur. 4. <i>Activity Based Budgeting</i> 5. Monitoring dan evaluasi secara intensif. |
| 5 | Keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan sistem penganggaran. 2. Penyempurnaan sistem pengadaan barang. 3. Penyempurnaan sistem pengawasan dan pengendalian. 4. Pendanaan pengembangan usaha. |
| 6 | Organisasi Sumberdaya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. 2. Pengembangan budaya perusahaan yang profesional. 3. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aspek pengelolaan sumberdaya hutan. 4. Penerapan sistem informasi sumberdaya manusia yang terbuka. 5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta mengubah sikap karyawan dalam rangka mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi lingkungan perusahaan sehingga mampu memiliki daya saing dan komitmen yang tinggi pada semua level. 6. Meningkatkan kinerja bidang perkantoran pada masing-masing unit kerja. 7. Pemanfaatan sarana dan prasarana (fasilitas kantor) secara maksimal. |

Keterangan: strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara dalam Rencana Jangka Panjang kurun waktu lima (5) tahun.

Sumber: Rencana Jangka Panjang (RJP) 2010-2015.

Banyaknya strategi-strategi yang dilaksanakan oleh KPH Banyuwangi Utara dalam mencapai tujuannya membuat peneliti memfokuskan bahan kajiannya pada salah satu strateginya yaitu menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC. Hal tersebut dilakukan peneliti agar topik penelitian yang diangkat peneliti dapat digali lebih mendalam. Mengingat bahwa FSC digunakan sebagai standart pengelolaan hutan yang baik mengarah pada kelestarian. Untuk itu penting untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan

sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015. Pada hal ini peneliti memfokuskan bahan kajiannya pada periode tertentu yaitu periode 2010-2015 dikarenakan pada periode tersebut KPH Banyuwangi Utara dalam perjalanannya menuju predikat hutan lestari dan telah mendapatkan predikat hutan lestari dengan satu periode kepemimpinan.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya setiap penelitian dilakukan karena adanya suatu masalah yang menimbulkan keraguan, oleh karena itu peneliti mencari tahu jawaban untuk masalah tersebut. Pada latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti mengangkat isu-isu yang dijadikan bahan penelitian. Dari isu tersebut memunculkan pertanyaan penelitian untuk digali lebih jauh lagi. Adapun rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini ialah “bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015?”. Penerapan pengelolaan hutan lestari bagaimana yang dimaksud itu ialah sesuai dengan standar pengelolaan FSC.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan permasalahan dan merupakan arahan dari hipotesis. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah mendeskripsikan bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini sebagai berikut.

1. Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran akan pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam perspektif manajemen sumberdaya manusia baik secara teoritis dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan referensi bagi kalangan akademis.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, dalam mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPH Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari pada periode 2010-2015.

3. Pribadi

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah. Selain itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Tinjauan pustaka ini memuat ulasan dan analisis terhadap berbagai literatur terkait yang telah dipublikasi sebelumnya. Proses penyusunan tinjauan pustaka sendiri meliputi tahapan yang penting diikuti secara urut, yakni dimulai dari menentukan topik, mencari literatur terkait, mengembangkan argument, melakukan survey terhadap literatur terkait, mengkritisi literatur tersebut, dan menulis tinjauannya. Tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar pustaka yang sekedar mendeskripsikan satu per satu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, lebih dari itu, tinjauan pustaka harus mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur tersebut sehingga dapat memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan.

2.1 Paradigma Administrasi Negara Tentang Pengelolaan Hutan Lestari

Melihat dari paradigma Administrasi maka tidak lepas dari tindakan-tindakan akademis tentang *public policy* yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor instutisional. Instansi-instansi pemerintah, departemen-departemen, dan instansi lainnya banyak melibatkan ke dalam pemikiran-pemikiran *public policy* yaitu memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat diciptakan. Organisasi-organisasi tersebut lebih banyak memikirkan kepentingan masyarakat. Dibutuhkan ahli-ahli analisis kebijaksanaan yang mampu mengevaluasi program-program yang ada, merencanakan program-program alternatif, dan berfikir kreatif mengenai cara pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah sosial dan masyarakat pada umumnya (Thoha, 2005:58).

Sebagaimana telah tercermin didalam dimensi pertama administrasi negara yaitu *public policy*. *Policy* merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Selain itu jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut

menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama, akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional, maka diciptakan suatu tindakan yang berupa *policy* yang dapat mendorong agar diciptakan situasi yang rasional. *Policy* disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *policy* merupakan teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif (Thoha, 2005:60). Sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli ilmu politik Harold-Lasswell dan filosof Abraham Kaplan menyatakan “...*policy as a projected program of goals, values, and practice...*” (*policy* dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika).

Pemerintah dapat melakukan banyak hal lewat proses pengambilan kebijaksanaan. Ruang lingkup public policy berdasarkan NASPAA (*National association of schools of public affairs and administration*) mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat umum (public interest), kebijaksanaan dan program yang mempercepat adanya kesempatan yang sama dan kesejahteraan, pengukuran-pengukuran untuk menaikkan pengertian rakyat terhadap pilihan-pilihan masyarakat dan pengaruhnya, standar formulasi program dan pelaksanaannya, prosedur penilaian yang jujur atas keuntungan dan kerugian dari aneka macam milik umum, dan pengukuran-pengukuran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijaksanaan dan evaluasinya (Thoha, 2005:74).

Adapun Caiden (Thoha, 2005:74) dengan beberapa revisi tambahan dari penulis merumuskan bahwa ruang lingkup *public policy* yaitu sebagai berikut.

1. Adanya partisipasi masyarakat

Membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan rakyat banyak maka public policy kurang bermakna. Dalam masyarakat modern, demokratis, dan yang berkekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, maka partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam urusan pemerintahan termasuk didalamnya urusan *public policy*.

2. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*Public Interest*)
Public interest merupakan suatu objek kepentingan yang semua orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara tertentu. Keikutsertaan semua orang dalam suatu wilayah masyarakat negara tertentu untuk menentukan kepentingan bersama tidak semata-mata didasari atas rasa simpati dari orang-orang tertentu kepada orang lainnya, tetapi juga didasarkan atas pemikiran yang rasional, seperti dilindungi, dihargai dan ditingkatkannya milik pribadi dari masing-masing anggota dalam masyarakat tersebut.

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa pemerintah atau institusional membuat dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat diberbagai segi kehidupan agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat secara langsung serta kejelasan tentang kepentingan masyarakat menjadi penting digaris bawahi bahwa adanya ruang lingkup mengenai *public policy*. Pada konsep hutan lestari adanya partisipasi masyarakat didalam fungsi ekonomi, ekologi, serta sosial menunjukkan bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.

Dalam tata kehidupan modern tidak ada satupun segi kehidupan dan penghidupan yang tidak disentuh oleh administrasi, bahkan sesungguhnya proses administrasi bukan hanya sekedar sentuhan, akan tetapi merupakan bagian dari kehidupan organisasional dan tak dapat dielakkan. Hal tersebut dapat terlihat dari peran administrator dalam mengambil tindakan dan mengambil keputusan yang memiliki dampak yang kuat terhadap semua segi kehidupan setiap orang dalam masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (Siagian, 1986:51).

Berangkat dari pengertian dalam Sistem Administrasi Negara sebagai berikut.

“Administrasi Negara pada hakekatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari sistem-sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama yang lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinterkasi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu (sanri dalam perencanaan kehutanan No. 44 Tahun 2004)”.

Sistem Pemerintahan secara luas adalah menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga kekuatan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, menjaga fundasi pemerintahan, sehingga berkelanjutan dan demokratis. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengelolaan hutan dalam bidang kehutanan merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling berpengaruh dan berkaitan satu sama lain serta memiliki peranan dan tujuan tertentu. Kajian yang terdapat dalam pengelolaan hutan lestari juga memiliki pengaruh kepada bidang lain yang pada dasar tujuannya ialah untuk kestabilan masyarakat serta lingkungan. Keterkaitan-keterkaitan tersebut mengarah kepada tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

“Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta” Tascereu dan Campos (Thoha, 2003:63).

Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Oleh karena itu, dalam konteks *good governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk memajukan dan mengawal proses pelaksanaan program terletak pada semua komponen negara. Atas dasar tersebut, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesungguhnya adalah bagaimana membangun kemitraan dan komunikasi yang baik antara ketiga aktor tersebut. Dalam proses perencanaan program, aspek transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi informal dapat diberikan ruang dalam menentukan arahan program yang akan dilaksanakan sehingga mereka merasakan dan ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan program, pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal sesuai dengan karakteristik *good governance* yakni *accountability*, dimana para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Artinya

adalah, publik (pemerintah), swasta dan *civil society* harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan publik.

Dalam pengelolaan kehutanan, Kementerian Kehutanan sendiri mendefinisikan *social forestry* sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. *Social forestry* merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam. Tujuan pengembangan *social forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari (Dephut, 2003).

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan membutuhkan dukungan politik dan kebijakan yang sangat kuat, serta mengadopsi paradigma baru yang mampumengaitkan ragam perspektif tersebut di atas pada realitas ruang yang menopang fungsi ekologi, sosial-budaya dan ekonomi secara simultan dan berkelanjutan. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis penetapan kebijakan dan praktek pengelolaan hutan harus ditempatkan secara tepat sebagai kekuatan untuk menggerakkan roda pembangunan kehutanan pada masa yang datang. Berbagai rencana jangka panjang terkait sektor kehutanan yang telah disusun tidak dapat berjalan dengan baik akibat lemahnya orientasi pemerintah untuk menyediakan kondisi memungkinkan bagi para pelaku pembangunan kehutan untuk berkompetisi secara bebas dan adil.

Arahan umum pembangunan kehutanan difokuskan pada terwujudnya kawasan hutan yang menjamin efisiensi ekonomi-ekologi (*ecological-economic efficiency*) dengan memelihara kualitas ekosistem hutan (integritas, stabilitas dan produktivitas), mencegah penyusutan sumberdaya dan efek yang negatif,

memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang di berbagai lapisan masyarakat secara adil dan merata. Kebijakan kehutanan juga harus meletakkan peran kehutanan di dalam konteks pembangunan ekonomi wilayah tanpa mengabaikan fungsi pengaturan jasa ekologis dalam kesatuan bentang alam wilayah provinsi dan kabupaten. Dalam konteks ini, KPH sebagai unit organisasi pemerintah yang diberi tugas untuk mengelola hutan di tingkat bawah harus diperkuat dengan kewenangan otonom pada tingkat manajerial, kebebasan dalam membangun kemitraan usaha atau konservasi dan didukung dengan mekanisme pendanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari pada tingkat unit pengelolaan ekonominya. Tata pemerintahan kehutanan harus mampu memisahkan secara tegas antara kewenangan pengambil kebijakan dalam konteks administrasi negara dan pengelolaan hutan di tingkat bawah untuk mendorong berkembangnya pengelolaan hutan lestari. Pembagian kewenangan administratif (desentralisasi) pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan peran kehutanan dalam pembangunan daerah atau wilayah. Pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) mempunyai kewenangan administratif dan tugas untuk merumuskan kebijakan, norma, standar, pengawasan dan evaluasi, sedangkan Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan administratif di dalam pengurusan kehutanan di daerah. Kinerja pengelolaan hutan lestari pada tingkat unit pengelolaan harus diserahkan sepenuhnya pada KPH sebagai unit organisasi pemerintah. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesesuai prinsip tata pemerintahan yang baik harus dapat diukur pada berbagai tingkatan pemerintahan hingga ke tingkat bawah.

2.2 Strategi

Setiap organisasi berada pada suatu kondisi lingkungan tertentu yang salah satu ciri utamanya ialah perubahan. Perubahan selalu terjadi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat juga dalam nilai-nilai sosial dan organisasional.

Dijelaskan oleh Siagian, S. (1986:7) bahwa setiap perubahan yang terjadi pasti membawa serta tantangan yang harus dihadapi dan kesempatan yang perlu dimanfaatkan oleh organisasi, baik untuk kepentingan masa kini maupun untuk

kepentingan masa depan. Dalam melakukan tugas yang tidak mudah untuk mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi dan kesempatan yang timbul, suatu organisasi biasanya dihadapkan kepada suatu keharusan-keharusan sebagai berikut.

1. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
2. Menetapkan berbagai sasaran yang ingin dituju.
3. Menetapkan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran.
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerja yang tepat.
5. Mengalokasikan sumber dana, daya, peralatan, serta tenaga manusia.
6. Memonitor hasil yang dicapai.
7. Melakukan berbagai perubahan organisasional apabila diperlukan.
8. Menata hubungan antar manusia dalam organisasi sedemikian rupa sehingga mereka bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Hal-hal tersebut diatas menjadi sorotan perhatian dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan menyelenggarakan suatu strategi organisasi. Strategi yang telah dirumuskan harus dapat memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan dan kesempatan, baik yang timbul di dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu sangat bergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang berada didalamnya. Dijelaskan oleh Siagian (1999:4) mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi memainkan peranan sangat besar dalam keberhasilan organisasi tersebut untuk menyelenggarakan berbagai kegiatannya.

Diungkapkan oleh Siagian (1999:47) yang mengatakan bahwa peranan pemimpin dalam suatu organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan juga dalam bukunya bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang pada akhirnya dinilai dengan menggunakan kemampuan mengambil keputusan. Hal ini menegaskan bahwa

kepemimpinan berintikan kemampuan mengambil keputusan yang berarti seluruh fungsi-fungsi kepemimpinan akan berangkat dan bermuara kepada satu titik sentral, yaitu pengambilan keputusan.

Salah satu segi kehidupan organisasional yang amat penting untuk selalu mendapat perhatian pimpinan puncak suatu organisasi adalah menyesuaikan kemampuan organisasi yang dipimpinnya dengan perubahan-perubahan lingkungan yang selalu terjadi. Konsep strategi merupakan salah satu alat yang tersedia bagi pemimpin untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi, baik yang sifatnya eksternal bagi organisasi maupun yang sifatnya internal (Siagian, 1986:17). Kemudian Siagian, S. (1986:23) menjabarkan ada empat kriteria utama yang harus dipenuhi sebagai persyaratan strategi yang baik yaitu sebagai berikut.

1. Strategi sebagai suatu keputusan jangka panjang harus mengandung penjelasan singkat tentang masing-masing komponen dari strategi organisasi yang bersangkutan, dalam arti terlihat kejelasan dari ruang lingkup, pemanfaatan sumber dana dan daya serta keunggulannya, bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dan sinergi antara komponen-komponen tersebut.
2. Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang fundamental sifatnya harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi itu akan membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi.
3. Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional dalam arti jelasnya satuan kerja strategis sebagai pelaksana utama kegiatan utama melalui pembagian kerja yang jelas sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih, saling melempar tanggung jawab dan pemborosan dapat dicegah.
4. Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat dan bukan merupakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum yang masih dapat diinterpretasikan dengan berbagai jenis interpretasi tergantung pada selera dan persepsi individual dari pembuat interpretasi.

Lingkungan kegiatan dalam sebuah organisasi begitu dinamis. Kekuatan internal dan eksternal cenderung mendorong terjadinya perubahan pada peraturan yang telah ada. Akibatnya, organisasi harus mengubah atau mengambil strategi baru agar mampu bersaing. Perubahan strategi akan menentukan arah tiap fungsi dari organisasi, termasuk juga fungsi manajemen sumberdaya manusia.

Strategi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti akan dihadapi (Siagian, 1986:21).

Strategi diperlukan agar mampu mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kemampuan organisasional untuk menghadapi masa depan yang selalu mengandung unsur ketidakpastian, setiap perubahan lingkungan yang pasti terjadi, tetapi juga harus mampu merencanakan dan mewujudkan perubahan-perubahan secara internal dalam organisasi agar tantangan, masalah, ancaman, gangguan dapat dihadapi dengan baik dan kesempatan yang timbul dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya (Siagian, 1986:13).

Menurut Robbins (dalam terjemahan Udaya 1994:134) strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Strategi memperhatikan cara maupun tujuan. Tujuan dan pengambilan keputusan mengenai strategi organisasi dapat direncanakan sebelumnya atau berevolusi begitu saja sebagai suatu pola dalam arus keputusan-keputusan yang bermakna. Tindakan strategis organisasi publik cenderung mengakibatkan lebih disentralisasikannya pengambilan keputusan dan meningkatnya formalisasi.

KPH Banyuwangi Utara memiliki wewenang untuk membuat strateginya berdasarkan pada kondisi teknis dan lapangan diwilayahnya. Strategi dibuat oleh pimpinan organisasi untuk pencapaian tujuan yaitu mewujudkan hutan lestari.

2.6 Partisipasi Masyarakat

Saat ini ekologi manusia menjadi dasar perkembangan paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat. Soerjani (dalam Mardikanto 2013:54) menjelaskan bahwa ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup (biotik) sesamanya dan benda-benda non-hidup (abiotik) disekitarnya. Sebagai bagian dari makhluk hidup peranan dan perilaku manusia dipelajari secara khusus dalam ekologi manusia, sehingga ekologi manusia berarti ekologi yang memusatkan pengkajian kepada manusia sebagai individu maupun sebagai populasi dalam suatu ekosistem. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang berlaku. Tujuannya intinya ialah memberantas kemiskinan, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata.

Partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat menurut Adi (2013:231) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Hidayat, H. (2015:6) dalam bukunya menjelaskan partisipasi adalah suatu keterlibatan mental, emosional, dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Kemudian dalam Hidayat, H. (2015:83) dijelaskan bahwa program partisipatif disektor kehutanan di Indonesia berawal disebabkan oleh dua kondisi obyektif yang tidak terbantahkan, yakni resistensi masyarakat terhadap rusaknya hutan dan kehilangan subsistensi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta penerapan pendekatan program persuasif Kementrian Kehutanan terhadap masyarakat setelah devastasi

hutan yang sangat masif. Saat ini pola partisipatif diimplementasikan sesuai dengan fungsi dan tujuannya hingga mendapatkan respon yang positif.

Partisipasi sebagai keikutsertaan dalam tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam jejaring komunitas (Wolcook dan Narayan dalam Mardikanto, 2013:82).

Mikkelsen mengutip dari Chambers (dalam Adi, 2013:229) melihat istilah partisipasi seringkali digunakan dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut.

1. Partisipasi digunakan sebagai label kosmetik (*cosmetic label*). Sebagai label kosmetik kata partisipasi sering kali digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik, sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai proyek tersebut.
2. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengooptasi (*coopting practice*). Dalam hal ini, partisipasi digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek. Misalnya, komunitas memberikan sumbangan waktu, dana, tenaga, dan material untuk mensukseskan suatu proyek yang dibantu oleh pihak luar. Seringkali digambarkan sebagai “mereka” berpartisipasi dalam proyek “kita”.
3. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering process*). Partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.

Dari ketiga bentuk partisipasi tersebut peneliti menganggap bentuk partisipasi yang menggambarkan proses pemberdayaan paling tepat digunakan dalam pengelolaan hutan lestari dimana masyarakat desa hutan dibina agar menjadi berdaya.

Zulkifli seorang konsultan lingkungan dan energi dalam artikelnya mengenai manajemen pengelolaan hutan lestari menjelaskan dasar pengelolaan

hutan berbasis masyarakat adalah paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Secara teori prinsip dasar memiliki karakter bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dimana mereka memiliki jaminan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Sebagai pelaku utama maka masyarakat sekaligus menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud bila terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada kelembagaan lokal sesuai dengan system sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Karena itu pendekatannya bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada pengelolaan hutan lestari, masyarakat terlibat langsung dalam program yang telah direncanakan dengan maksud agar tujuan program dapat tercapai sehingga memberikan manfaat yang luas serta berkelanjutan. Disampaikan pada Hasil Rangkaian Proses Pembahasan Tentang Review PP NO. 44 Tahun 2004 yaitu pembaharuan dari UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Perencanaan Kehutanan yang dijelaskan sebagai berikut.

- I. Hak dalam Peranserta Masyarakat
 - a. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan [Pasal 68 ayat (1)].
 - b. Selain hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), masyarakat dapat:
 1. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.
 3. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
 4. Melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan pembangunan kehutananbaik langsungmaupun tidak langsung.
 - c. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Kewajiban dalam Peranserta Masyarakat

- a. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjagakawasan hutan dari gangguan dan perusakan[Pasal 69 ayat (1)].
- b. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Pihak lain, atau Pemerintah [Pasal 69 ayat (2)].

III. Peranserta Para Pihak dalam Peranserta Masyarakat

- a. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- b. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Forum Pemerhati Kehutanan.

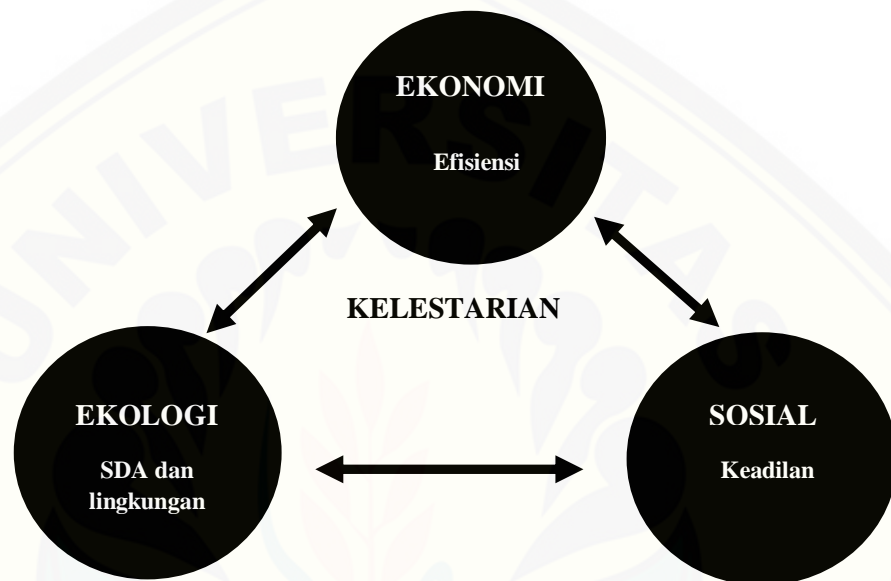
Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat ialah perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, sehingga melalui partisipasi yang diberikan menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintahan sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat untuk dapat memperbaiki mutu hidupnya.

2.5 Hutan Lestari

Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan menjadi awal lahirnya konsep hutan lestari dimana dunia menyadari pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi. Kesepakatan ini jelas bahwa pengelolaan sumberdaya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek yakni ekonomi, ekologi dan sosial. Kemudian diperlukannya upaya untuk mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi hal utama untuk mendukung upaya perlindungan daya

dukung ekosistem dan fungsi lingkungan sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial disebut dengan pembangunan berkelanjutan (Napitupulu, A. 2013:34).

World Bank (dalam Napitupulu, A. 2013:35) telah menjabarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kerangka segitiga sebagai berikut.



Gambar 1. Segitiga Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Napitupulu, A. (2013:35)

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan telah banyak diadopsi negara-negara dan oleh banyak lembaga salah satunya dalam bidang kehutanan. Hidayat, H. (2015) menyebutkan tujuan dari keberadaan hutan lestari adalah terpeliharanya sumber daya hutan, ketersediaan potensi air yang melimpah untuk menjaga ekosistem hutan, ketersediaan stok carbon sink (zat asam) untuk ruang pernapasan manusia, memelihara flora dan fauna, tanaman obat-obatan, madu, penyerbuk, mempertahankan kesuburan lahan, sumber daya genetika tumbuhan komersial dimasa depan, dan sebagainya.

Mengingat sangat pentingnya hutan dalam kehidupan manusia, banyak manfaat yang dapat kita ambil dari keberadaan hutan. Untuk itu diperlukannya pemeliharaan yang bersifat lestari agar keberadaan hutan terus berlangsung dan tidak berkurang fungsinya dari waktu ke waktu. Dengan menjaga hutan, maka kita

ikut melindungi kehidupan di masa depan. Berikut beberapa manfaat dari hutan lestari yang kita peroleh.

1. Hutan dan pepohonan mampu memenuhi kebutuhan komunitas lokal yang tengah menghadapi ancaman perubahan iklim.
2. Pepohonan membantu menciptakan iklim mikro (micro climate) bagi lahan pertanian, menjaga ketersediaan air dan kesuburan tanah sehingga membantu menciptakan proses produksi pertanian yang berkelanjutan. (<http://www.hijauku.com/2013/03/28/lima-manfaat-menanam-pohon-dan-melestarikan-hutan/>, diakses pada 15 September 2015 pada pukul 00.45)
3. Sebagai Sumber Makanan, hutan dijadikan penduduk di daerah sekitar hutan sebagai sumber makanan melalui berburu ataupun mengambil tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan. Banyak tanaman-tanaman hutan yang dapat digunakan sebagai makanan ataupun sumber air bersih dari akarnya.
4. Menyediakan oksigen O₂, dengan jumlah pepohonan yang banyak, tentunya hutan akan memberikan suplay kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi ini.
5. Menyerap karbon dioksida (CO₂), carbon dioksida adalah gas yang berbahaya apabila dihirup secara berlebih oleh manusia. Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memerlukan gas tersebut untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk bumi.
6. Pelestarian Plasma Nutfah, plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. (<http://sadar-hutanku.blogspot.co.id/p/manfaat-hutan-bagi-manusia.html> diakses pada 15 September 2015 pada pukul 00.50).
7. Hutan sebagai pelindung, manusia tidak menyadari bahwa hutan juga bisa bermanfaat sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah dan manfaat ini merupakan manfaat dari hutan lindung, sedangkan pada hutan konservasi bermanfaat

perlindungan sistem penyangga kehidupan makhluk hidup termasuk manusia dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.

8. Hutan sebagai produksi, hutan yang bermanfaat sebagai produksi ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia didalam bidang perekonomiannya, karena produksi hutan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kemakmurannya. Akan tetapi harus memiliki asas-asas kelestarian hutan itu sendiri yang mencakup yaitu: aspek penanaman, aspek pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
9. Hutan sebagai sarana pendidikan dan tempat wisata, hutan bisa di manfaatkan sebagai sarana pendidikan sekaligus tempat wisata tempat rekreasi bagi masyarakat, adapun kawasan hutan yang biasa di jadikan sebagai tempat rekraesi yaitu kawasan hutan suaka alam serta kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional. (<http://gamank46.blogspot.co.id/2012/01/manfaat-hutan-bagi-manusia.html> diakses pada 15 September 2015 pada pukul 00.55).

Kemudian dari sembilan poin tersebut peneliti menambahkan beberapa poin manfaat yang didapatkan oleh perhutani (dalam hal ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH))yang memiliki label pengelolaan hutan lestari yaitu sebagai berikut.

1. Kayu perhutani mampu menembus pasar internasional.
2. Kayu perhutani memiliki sertifikat asli berlabel hutan lestari.
3. Perhutani dapat memproduksi kayu secara terus-menerus setiap tahunnya.
4. Kayu yang bersertifikat memberikan informasi kepada konsumen bahwa kayu tersebut memang berasal dari hasil pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1991 Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Hutan Lestari adalah hutan yang sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan generasi masa depan. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) adalah proses mengelola hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu secara tegas, dalam menghasilkan barang dan jasa hutan yang diperlukan secara berkelanjutan, tanpa menyebabkan pengurangan nilai dan produktivitas hutan di masa yang datang dan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap lingkungan fisik dan sosial (*International Tropical Timber Organization, ITTO, 1998*).

Dalam Hidayat, H. (2015:44) dijelaskan ada tiga arti penting sumber daya hutan, yaitu untuk masyarakat tradisional, kepentingan nasional, dan kepentingan internasional tidak sepenuhnya dipahami atau dilakukan dalam bentuk kebijakan yang melindungi pelestarian hutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup, konsep pengelolaan hutan lestari dapat diartikan secara luas sebagai praktik pengelolaan hutan yang mampu menjaga fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi hutan dari waktu ke waktu (FAO, 1993:4; ITTO, 1992:2). Mengingat kompleksitas masalah yang terkandung dalam gagasan pengelolaan hutan lestari, dituntut perlunya untuk menyeimbangkan ketiga fungsi tersebut, tanpa bermaksud untuk menempatkan salah satu dari ketiga fungsi itu di atas fungsi yang lain.

Dalam hal ini Perum Perhutani bertujuan mengelola hutan secara lestari agar menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas serta menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik fungsi hutan untuk kesejahteraan Perusahaan Perum Perhutani dan juga masyarakat, oleh karena itu pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan fungsi dan manfaatnya menjadi dasar pengelolaan dalam Manajemen Hutan Lestari (MHL). MHL di KPH Banyuwangi Utara merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengurusan perusahaan hingga pengawasan dan evaluasi dengan memperhatikan tiga aspek kelestarian fungsi produksi atau ekonomi, fungsi sosial dan fungsi lingkungan.

Zulkifli seorang konsultan lingkungan dan energi dalam artikelnya mengenai manajemen pengelolaan hutan lestari menjelaskan manajemen hutan lestari perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut.

1. Keutuhan fungsi ekosistem, yaitu interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem.
2. Memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan.
3. Tidak hanya kepentingan generasi sekarang tetapi juga kepentingan generasi masa depan.
4. Perubahan lingkungan karena berlangsung penyusutan sumberdaya alam.
5. Proses pengelolaan bersifat dinamis dan fleksibel.

2.5.1 Kelestarian Fungsi Produksi

Serageldin (dalam Napitupulu, A. 2013:35) menjelaskan berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Hutan memiliki fungsi produksi karena hutan merupakan sumber penghasil produk yang memiliki nilai ekonomi. Dalam pengelolaannya hutan produksi harus tetap mengikuti prinsip-prinsip hutan lestari sehingga tidak menimbulkan kerugian diwaktu yang akan datang.

Pengelolaan fungsi produksi secara lestari perlu memperhatikan program kerja sebagai berikut.

1. Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi dan pengelolaannya sesuai fungsi.
2. Pengaturan kelestarian dengan melakukan perhitungan ketat secara lestari, melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, pemeliharaan tegakan hutan, dan pemanenan.

3. Perlindungan fungsi lingkungan, berupa reboisasi dan rehabilitasi hutan, perbaikan jenis pada Kawasan perlindungan setempat, pengendalian pola tanam, dan perlindungan hutan.
4. Pemanenan ramah lingkungan, pemanenan tersebar, penyaradan tidak merusak fisik tanah.

Pengelolaan hutan merupakan usaha jangka panjang. Untuk menjamin kelestarian hasil sekaligus kelestarian usaha mutlak diperlukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pengelolaan hutan lestari yang baik harus memiliki rencana jangka panjang kedepan untuk selalu menjaga keberlangsungan pembangunan dan menjaga sumberdaya hutan dapat terus tersedia dan tidak berkurang nilainya.

Dalam kelestarian fungsi produksi yang dilakukan KPH Banyuwangi Utara bukan hanya semata-mata hanya memaksimalkan hasil produksi dari sumber-sumber hutan yang ada, akan tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang ada di sekitarnya karena ketiganya saling mempengaruhi dan sangat penting perannya dalam kelestarian hutan.

2.5.2 Kelestarian Fungsi Sosial

Serageldin (dalam Napitupulu, A. 2013:36) menjelaskan berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Hutan memiliki kelestarian fungsi sosial karena hutan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat luas, diantaranya adalah sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan terutama pangan, sumber mata pencaharian, tempat penelitian, dsb. Pengelolaan kawasan hutan dalam konteks kelola sosial adalah menjaga dan meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat desa hutan seperti peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan pendapatan masyarakat sekitar, persepsi masyarakat terhadap perusahaan maupun terhadap lingkungan hidup.

Dilihat dari perspektif sosialnya dalam (www.cifor.org diakses pada 23 Februari 2015 pukul 23.00), kelestarian dapat dikatakan meliputi sebagai berikut.

1. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, sering terfokus pada masyarakat yang hidup di hutan.
2. Kegiatan masyarakat yang mempengaruhi kelestarian hutan.

Kemudian dijabarkan ada lima bidang dalam prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam keterlibatannya pada pelaksanaan fungsi sosial yang dianggap sebagai rancangan hak-hak kelestarian, yaitu sebagai berikut.

1. Keamanan dan kecukupan akses terhadap sumber daya. Akses sebaiknya dinilai pada masa sekarang maupun di masa depan.
2. Peluang Ekonomi. Kegiatan yang terkait dengan hutan harus mempertahankan atau meningkatkan berbagai peluang mata pencaharian masyarakat.
3. Warisan dan identitas. Hak-hak masyarakat terhadap nilai kebudayaan mereka, kebiasaan, penggunaan lahan dan materi dari hutan harus dihormati, untuk waktu sekarang maupun dalam konteks untuk mempertahankan budaya bagi generasi muda.
4. Keadilan. Harus ada pemecahan konflik serta pembagian keuntungan, hak-hak, tanggung jawab dan insentif secara adil.
5. Keamanan dan kesehatan. Pekerjaan, tempat tinggal di dalam hutan atau pemanfaatan hutan tidak boleh mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat (secara fisik maupun mental).

Dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat lebih lanjut dan pengaruh masyarakat terhadap hutan, definisi Ostrom (dalam CIFOR.org diakses pada 23 Februari 2015 pukul 23.00) relevan untuk memahami bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat lokal dapat mempengaruhi pengelolaan hutan secara positif (atau sumber daya lain) di bawah pengendalian/kontrol kolektif/bersama masyarakat. Ia menguraikan delapan 'prinsip rancangan' yang jika dipenuhi akan mengarah kepada pengelolaan efektif sumber daya lokal milik bersama.

Sedikitnya ada sembilan syarat sosial yang diperlukan untuk pengelolaan efektif sumber daya oleh suatu kelompok yaitu sebagai berikut.

1. Batas-batas didefinisikan secara jelas dan disepakati. Hak-hak guna dan pembagian keuntungan didefinisikan secara jelas dan disepakati.
2. Kemampuan melindungi sumber daya. Para pengguna hutan memiliki kemampuan untuk melarang orang luar masuk.
3. Mekanisme pengambilan keputusan. Masyarakat yang dipengaruhi oleh hutan dapat mengatakan bagaimana cara mengelola sumber daya dan bagaimana pembagian keuntungannya. Mereka juga memiliki kemampuan kelompok dalam membuat keputusan akhir.
4. Penyelesaian konflik sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik, secara internal maupun eksternal bagi kelompok tersebut.
5. Pemantauan. Informasi tentang kualitas sumber daya bagi kelompok tersebut tersedia.
6. Ukuran kelompok dan organisasi. Kelompok-kelompok ini umumnya cukup kecil sehingga memungkinkan kontak komunikasi yang teratur. Jika jumlah orang yang terlibat cukup besar, maka kelompok-kelompok dikumpulkan untuk meningkatkan efisiensi pengaturan.
7. Insentif/keuntungan. Keuntungan bersih bagi masyarakat adalah positif dan dapat mencakup keuntungan ekonomi dan juga budaya atau hal-hal yang bukan berupa materi. Insentif bisa positif atau negatif (contoh: sanksi). Pilihan-pilihan pengelolaan hutan sebaiknya dipertimbangkan setelah dibandingkan dengan hasil keuntungan dari berbagai kegiatan lain (*opportunity cost*).
8. Berbagai bentuk masukan. Masyarakat memiliki tenaga, teknologi, informasi, dan modal atau masukan yang cukup, yang diperlukan untuk pengelolaan lestari.
9. Nilai pelestarian/konservasi atau komitmen terhadap kelestarian. Masyarakat yang menggunakan hutan menghargai kelestarian hutan dan mencari cara-cara untuk memelihara kualitas sumber daya.

Dalam Hidayat, H. (2015:35) dijelaskan pemerintah melalui Perum Perhutani telah meluncurkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), yaitu suatu pengelolaan sumber daya hutan dengan pola kolaborasi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau para pihak yang berkepentingan untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang optimal serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, adaptif, partisipatif, dan akomodatif. Program PHBM adalah pengelolaan sumberdaya hutan dengan cara berbagi, yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan waktu, ruang dan lahan, dan hasil dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mendukung. PHBM hadir dengan gagasan bahwa pengelolaan hutan bukan hanya tanggung jawab Perhutani saja, melainkan harus dilakukan bersama dengan semua elemen termasuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena hutan yang ada bukan hanya untuk kepentingan Perhutani melainkan juga untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Dalam Hidayat, H. (2015:36) dijelaskan secara lebih spesifik PHBM diarahkan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran Perum Perhutani, peran dan akses masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
2. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah serta kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
3. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder*.
4. Mendukung peningkatan IPM dengan 3 (tiga) indikator: tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.
5. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

7. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan, produktifitas, dan keamanan hutan.

Kelestarian fungsi sosial merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka kelestarian fungsi sosial. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Sasarannya adalah masyarakat setempat melalui upaya penyadaran, peningkatan kapasitas dan akses kepada sumberdaya hutan.

Oleh karena itu pengelolaan fungsi sosial merupakan komitmen KPH Banyuwangi utara dalam mengelola hutan dengan memperhatikan fungsi sosial terdiri dari sosial ekonomi, pembinaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan masyarakat. Untuk itu KPH Banyuwangi Utara menyelenggarakan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip kebersamaan, berdaya, berbagi dan transparan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Dijelaskan pada Panduan untuk Pengembangan, Pengujian dan Pemilihan Kriteria dan Indikator untuk Pengelolaan Hutan Lestari dalam (www.cifor.org diakses pada 23 Februari 2015 pukul 23.00), PHBM dilaksanakan dengan beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.

2. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
3. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
8. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
9. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
10. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Dalam sistem PHBM, hutan terbagi dalam pangkuan desan hutan, dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan top down approach, dibuat bersama antara MDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP). Dalam PHBM, masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindungi, dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan stakeholder lainnya (multipihak) aktif memfasilitasi

masyarakat untuk menumbuh-kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan di lahan-lahan desa sekitar hutan.

Sistem PHBM menganut pada prinsip pengelolaan hutan *community based forest management* (CBFM) dan *resources based forest management* (RBFM). Prinsip pengelolaan hutan CBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasannya. Dan Prinsip pengelolaan hutan RBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak hanya bertumpu kepada hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya saja, tetapi meliputi pengelolaan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun yang ada di permukaan lahan hutan, seperti: Air, Agribisnis, Wisata Alam, dan lainnya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.5.3 Kelestarian Fungsi Lingkungan (Ekologi)

Dalam bukunya Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya, Prof. Dr. Irwan, D (2014:6) menjelaskan ekologi merupakan salah satu cabang biologi yaitu ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi berasal dari Bahasa Yunani “oikos” (rumah atau tempat hidup) dan “logos” (ilmu). Secara harfiah ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap alamnya dan lingkungan adalah sejumlah unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan di luar organisme yang mempengaruhi kehidupan organisme.

Serageldin (dalam Napitupulu, A. 2013:36) menjelaskan berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya mengelola hutan dengan tidak merusak dan mengurangi kualitas dan

kuantitas lingkungan. Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dsb.

Pada umumnya kegiatan pengelolaan lingkungan terdiri dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pengelolaan pemantauan lingkungan meliputi kegiatan hidrologi dan kualitas air, fisik tanah, kawasan perlindungan setempat, biologi, keberadaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi HCVF, situs budaya dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

KPH Banyuwangi Utara selalu melaksanakan kegiatan pemantauan serta melakukan prinsip-prinsip yang mengedepankan lingkungan sebagai prioritas utamanya guna mewujudkan hutan lestari.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis karya ilmiah diperlukannya terlebih dahulu memetakan teori ataupun literatur-literatur lainnya yang berkualitas dan mendukung proses penelitian. Bungin (2011:64) menjelaskan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh oranglain di tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian apa yang pernah dilakukan orang lain terhadap masalah yang saat ini akan dan sedang ditulis. Perlukah diadopsi hasil-hasil penelitian itu ataukah justru dikritik atau diperbandingkan. Memetakan penelitian terdahulu juga digunakan untuk memahami posisi oranglain dan posisi penulis dengan tulisannya itu.

Beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ja Posman Napitu, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Tahun 2007, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Wilayah Borneo. Pada penelitian tersebut dijelaskan tentang pemberdayaan masyarakat asli sekitar hutan di Desa Melinau, Kalimantan Timur yang merupakan areal yang luas dengan kondisi masyarakat antar desa sangat berjauhan dan terpencil yang merupakan gambaran umum tentang kondisi kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rizal HB , Indah Novita Dewi & Priyo Kusumedi Tahun 2011, dengan judul Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran tokoh visioner diperlukan dalam penyadaran masyarakat dalam mendukung program KPH yang akan memberi ruang kepada masyarakat untuk menggarap lahan hutan secara legal formal.

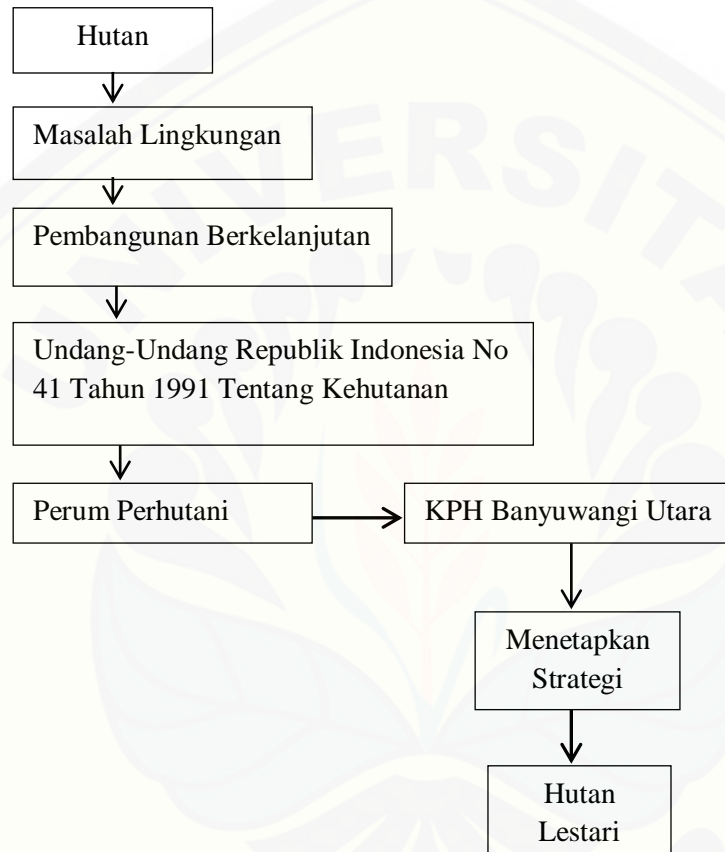
2.7 Kerangka Berpikir

Suriasumantri (dalam Hasan 2002:48) memberikan penjelasan mengenai kerangka berpikir yaitu kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan tentang alur pandangan atau pikiran peneliti untuk memberi penjelasan kepada orang lain.

Dalam kerangka berfikir ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana hutan merupakan bagian yang sangat penting dari bumi menyangga kehidupan makhluk hidup seisinya. Saat manusia terlena dengan berbagai kepentingannya tanpa memandang akan fungsi hutan lebih jauh, maka eksploitasi hutan besar-besaranpun terjadi. Dengan mengatasnamakan kebutuhan dan kepentingan menjadi alasan berbagai pihak lalai akan keseimbangan alamnya. Masalah-masalah lingkungan bermunculan di berbagai daerah di seluruh dunia. Banjir, longsor, perubahan iklim, dan lain sebagainya merupakan potret dari masalah lingkungan akibat berkurangnya fungsi-fungsi hutan. Melihat permasalahan yang semakin berdampak buruk bagi kehidupan maka menarik perhatian para pemimpin-pemimpin dunia dalam membuat kebijakan mengenai hutan. Mengadopsi dari pembangunan berkelanjutan ke dalam dunia kehutanan diharapkan dapat menyelamatkan apa yang menjadi permasalahan lingkungan, dimana hutan dikelola agar bertahan hingga generasi ke generasi.

Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia merasa memiliki andil besar dalam pengelolaan hutan. Dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan dikelola harus menggunakan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Perum Perhutani sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara dalam mengelola hutan yang ada di Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola hutannya dengan mempersiapkan setiap unit kelola dalam melaksanakan prinsip-prinsip hutan lestari. KPH Banyuwangi Utara merupakan salah satu unit kelola di tingkat tapak yang melaksanakan prinsip-prinsip hutan lestari sehingga dipersiapkan dalam perjalanannya untuk mendapatkan sertifikat

hutan lestari secara internasional melalui lembaga-lembaga terpercaya. Agar mendapatkan target yang telah direncanakan maka KPH Banyuwangi Utara membuat serangkaian strategi-strategi pencapaian tujuan. Dari strategi-strategi tersebut maka KPH Banyuwangi Utara berhasil memperoleh predikat hutan lestari.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Gunawan (2013:79) penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Sedangkan menurut Supranto, J. (dalam Hasan 2002:10) penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Hasan (2002:20) menjelaskan bahwa metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu: *methodos* = cara atau jalan, *logos* = ilmu. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Suparlan (dalam Gunawan 2013:34) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Bogdan & Taylor (dalam Gunawan 2013:82) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data, fakta, atau informasi tentang bagaimana strategi KPH Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari. Dimana pengembangan tersebut yang akan diteliti melalui proses penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data akurat yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto no 34-36, Kabupaten Banyuwangi.

Perum Perhutani sebagai subyek hukum dalam melaksanakan kegiatannya menyediakan pelayanan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk nilai keuntungan prinsip pengelolaan perusahaan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai pemenuhan hajat hidup orang banyak serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Secara ringkas kegiatan Perum Perhutani adalah memantapkan ketahanan perusahaan melalui usaha pelestarian manfaat sumber daya hutan, peningkatan keuntungan yang optimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

3.3 Fokus Penelitian

Gunawan (2013:109) menjelaskan penetapan fokus berarti membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang juga membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus berarti menetapkan kriteria data penelitian. Dengan pedoman fokus masalah seorang peneliti dapat menetapkan data yang harus dicari. Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus penelitian. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti berfokus pada memberikan jawaban atas perumusan masalah yang telah ditentukan yaitu bagaimana strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam mewujudkan hutan lestari periode 2010-2015. Mengingat bahwa strategi merupakan cara yang digunakan dalam pencapaian tujuan, maka KPH Banyuwangi Utara membuat serangkaian strategi-strategi dalam mewujudkan tujuannya yaitu hutan lestari. Salah satu strateginya yaitu penerapan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC. Strategi tersebut kemudian menarik peneliti untuk lebih jauh lagi menggali dalam kajian penelitiannya. Pada hal ini peneliti membatasi bidang kajiannya pada periode tertentu yaitu 2010-2015 sehingga diharapkan peneliti menjadi lebih fokus dalam menetapkan data pada penelitiannya.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang akan dilakukan peneliti agar mendapatkan data atau informasi. Informan adalah orang yang diwawancarai atau orang dimintai informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Bungin (2011:107) menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat di mana penelitian itu dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif dimungkinkan menggunakan tiga cara dalam menentukan dan menemukan informan sebagai berikut.

1. Prosedur Purposif

Adalah salah satu strategi menentukan informan, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu.

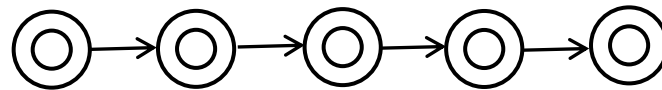
2. Prosedur Kuota

Dalam prosedur ini, peneliti memutuskan saat merancang penelitian, berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan. Karakteristik mungkin termasuk usia, tempat tinggal, jenis kelamin, kelas, profesi, status perkawinan, dll. Kriteria yang dipilih memungkinkan peneliti untuk fokus pada orang yang peneliti perkirakan akan paling mungkin memiliki pengalaman, tahu tentang, atau memiliki wawasan ke dalam topik penelitian.

3. Prosedur *Snowball* (bola salju)

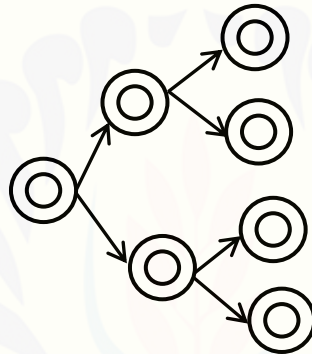
Dalam prosedur ini, dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberikan informasi kepada peneliti. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan saat menggunakan prosedur snowball yaitu; apabila informan dengan karakter tertentu sulit ditemukan, informan yang ditemui bersedia merujuk peneliti ke informan lain, memungkinkan perkembangan mata rantai rujukan sampai pada *snowball* yang memadai sebagai informan penelitian yang dibutuhkan peneliti. Namun peneliti harus memverifikasi kelayakan setiap informan, untuk memastikan informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan karena informan benar-benar memahami masalah penelitian yang diperlukan peneliti. Ada beberapa model *snowball* yang dikutip dari Castillo (dalam Bungin 2011:109) yang dapat digunakan di dalam penelitian sebagai berikut.

1. LinearSnowball Modle



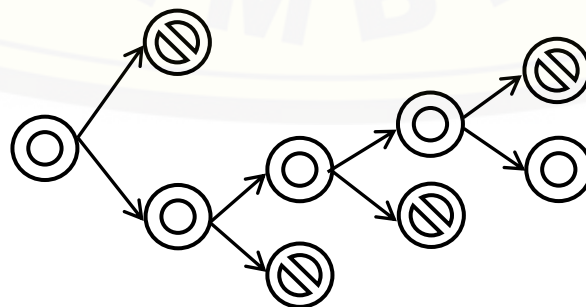
Model *snowball* linier memungkinkan peneliti bergerak linier untuk menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan membentuk bola salju yang besar secara linier.

2. Exponential Non-Discriminative Snowball Modle



Model ini adalah model komposit tanpa deskriminasi terhadap informan. Artinya, semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, sehingga perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar dan biasanya berimbang dan subur.

3. Exponential Discriminative Snowball Modle



Model ini adalah model selektif yang dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Artinya, berdasarkan beberapa pertimbangan dan tindakan selektif peneliti, maka tidak semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya dipilih oleh peneliti karena peneliti diberi hak untuk menyeleksi informan berikutnya, sehingga perkembangan jaringan snowball menunjukkan ada bagian jaringan yang berkembang subur, namun ada bagian lain yang mati atau tidak banyak berkembang.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik prosedur purposif dan prosedur *snowball* sehingga memperoleh informan-informan kunci yang sangat mengerti dan memahami mengenai penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan menggunakan teknik ini peneliti memperoleh informan yang berkecimpung langsung yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti juga diberi hak untuk menentukan informan yang dianggap paling dekat dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan informan utama yang menjadi kunci dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu Kepala KPH Banyuwangi Utara Bapak Ir. Artanto. Dari beliaulah kemudian peneliti menemui narasumber-narasumber lain yang dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti juga diberikan keleluasaan dalam menentukan informan berdasarkan bidang yang ingin digali lebih jauh oleh peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku dan referensi lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasan (2002:45) mengungkapkan bahwa kegiatan penelitian hampir semuanya selalu bertolak dari ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara mengutip apa-apa yang sudah dikemukakan ahli lain. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada di buku atau hasil penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya.

Peneliti berusaha mencari buku, jurnal, dan referensi yang relevan guna mempertajam dan memperdalam khasanah penelitian, serta dapat digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh guna menjawab berbagai permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data pertama dikarenakan peneliti membutuhkan landasan-landasan informasi awal sebelum terjun langsung ke tempat penelitian. Dari informasi-informasi awal yang dikumpulkan tersebut peneliti menggunakannya sebagai “pancingan” atau bahan analisis awal dalam perjalanannya. Teknik kepustakaan juga digunakan peneliti sebagai gambaran awal mengenai hal yang akan diteliti. Dari teknik kepustakaan pula peneliti mendapat tambahan informasi mengenai penelitian yang dijalankan.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah melakukan tanya jawab seputar topik penelitian dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara menurut Moleong (2001:135) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara tersebut ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Gunawan (2013:162) membedakan tipe wawancara dalam tataran luas sebagai berikut.

1. Wawancara terstruktur, digunakan karena informasi yang diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.
2. Wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes dan terbuka. Sugiyono (dalam Gunawan 2013:163) Dalam pelaksanaan wawancara lebih bebas karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

Dari pernyataan diatas maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang mengerti dan memahami serta terlibat langsung pada masalah terkait yakni orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga jawaban atas wawancara menjadi akurat. Sebelum wawancara, peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan sudah ditentukan informan mana yang akan diwawancarai. Peneliti juga membuat jadwal wawancara dengan informan yang selanjutnya ditentukan kapan dan dimana wawancara dapat dilakukan. Peneliti juga melakukan wawancara bersifat santai mengalir dengan tetap mengacu pada tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa narasumber yang dapat diwawancarai oleh peneliti.

Tabel 3.1 Daftar informan wawancara KPH Banyuwangi Utara

| Nama | Jabatan | Waktu/Tempat | Perihal |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Bp. Ir. Artanto | Administratur KPH Banyuwangi Utara | 22 Juni 2015 pukul 11.00/Kantor | Strategi-strategi KPH Banyuwangi Utara, siapa saja yang terlibat |
| Bp. Fajar Wicaksono S.hut | Wakil Administratur | 22 Juni 2015 pukul 11.00/Kantor | Yang membedakan KPH Banyuwangi Utara dengan KPH lain, trik KPh Bwi Utara |
| Bp. Suwadi | KSS Perencanaan dan Tanaman | 10 Maret 2015/Lapangan | Tanaman dan produksi |
| Bp. Januar Suhartono SP | KSS Lingkungan | 10 Juni 2015 pukul 10.00/Kantor | Kondisi kerusakan hutan di KPH Bwi Utara |
| Bp. Budiharto | Kaur Lingkungan | 3 Maret 2015 pukul 08.00/Kantor | Sejauh mana peran lingkungan dalam hutan |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | lestari |
| Bp. Agus Sutisno | Kepala Urusan Keuangan | 3 Maret 2015 pukul 10.00/Kantor | Bagaimana perencanaan keuangannya |
| Bp. Winarso | Kepala Urusan Umum | 2 Maret 2015 pukul 08.00/Kantor | Administrsi |
| Bp. Wasis Siswanto | Kepala Urusan SDM | 2 Maret 2015 pukul 08.00/Kantor | SDM |
| Bp. Dwi Danu Sasono | KSS PHBM | 2 Maret 2015 pukul 08.15/Kantor | Pengelolaan hutan bersama masyarakat |
| Bp. Doni | Pegawai PHBM | 2 Maret 2015 pukul 09.00/Kantor | Bantuan kepada masyarakat |
| Bp. Sumarno | Anggota LMDH Bajul Mati | 10 Maret 2015 pukul 11.00/Lapangan | Manfaat LMDH bagi masyarakat |
| Bp. Suroso | Pegawai Tanaman | 10 Maret 2015 pukul 11.00/Lapangan | Budidaya stek pucuk |
| Masyarakat stek pucuk | Pegawai tanaman stek pucuk | 10 Maret 2015 pukul 11.00/Lapangan | Bekerja dengan KPH Bwi Utara |
| Ibu Sukidi | Masyarakat | 10 Maret 2015 pukul 11.30/Lapangan | Kedekatan dengan KPH Bwi Utara |

Keterangan: Wawancara yang dilakukan oleh peneliti (2015).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber digunakan untuk mendapatkan informasi dan data guna memperdalam penelitian yang dilakukan. Wawancara yang dilakukan bertempat di kantor KPH Banyuwangi Utara dan di lapangan yaitu BKPH Bajulmati. Dari wawancara tersebut peneliti menggali informasi dan menganalisisnya.

c. Teknik Observasi (Pengamatan)

Menurut Kartono (dalam Gunawan, 2013:143) pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan keakuratan, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Lebih lanjut Guba & Lincoln (dalam Gunawan, 2013:144) menjelaskan manfaat dari observasi sebagai berikut.

1. Pengamatan merupakan pengalaman langsung yang dinilai alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran.
2. Dengan pengamatan, dimungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang sebenarnya.

3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan maupun yang diperoleh dari data.
4. Sering terjadi keragu-raguan pada peneliti terhadap informasi yang diperoleh, untuk itu peneliti memanfaatkan pengamatan.
5. Pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus.
6. Kasus-kasus tertentu ketika teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Pengamatan dimaksudkan agar memungkinkan pengamat melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek yang diteliti, menangkap makna fenomena dan budaya dari pemahaman subjek. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh peneliti. Sehingga interpretasi peneliti harus berdasarkan interpretasi subjek yang diteliti.

Setelah melakukan teknik kepustakaan dan wawancara barulah kemudian dilakukan teknik observasi. Pada observasi inilah peneliti mengamati hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang terjadi dan dilakukan oleh subyek ataupun objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di kantor KPH Banyuwangi Utara juga pada tingkat lapang dimana strategi-strategi dijalankan. Dari observasi tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana proses yang dijalankan.

d. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen menurut Sugiyono (dalam Gunawan 2013:176) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Peneliti menggunakan studi dokumen sebagai bahan pelengkap dan penguat dalam penelitiannya yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian.

Dalam penelitiannya, peneliti mengumpulkan data-data, gambar, hasil wawancara sebagai dokumentasi penguat penelitiannya. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pendukung fakta-fakta yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi mengenai KPH Banyuwangi Utara tersebut di sertakan oleh peneliti dalam bentuk lampiran di penelitiannya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Melihat begitu besarnya posisi data maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Gunawan (2013:217) diterangkan bahwa data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula, demikian sebaliknya data yang sah (*valid/kredibel*) akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus berusaha mendapatkan data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria sebagai berikut.

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Berfungsi untuk melaksanakan inkuiri atau penyelidikan sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat dicapai, dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Apabila pada penelitian kuantitatif berdasarkan pada hasil penelitian pada sampel dapat digeneralisasikan, pada penelitian kualitatif meskipun kejadian empiris sama, tetapi bila konteksnya berbeda maka tidak mungkin dapat digeneralisasikan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah reabilitas pada kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif bila diadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Pada penelitian kualitatif sangat sulit untuk mencari kondisi yang benar-benar sama, selain

itu manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan sangat berpengaruh.

4. Kepastian (*confirmability*)

Berasal dari konsep objektivitas pada kuantitatif. Dalam kenyataannya sesuatu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, atau penemuan seseorang. Padahal pengalaman orang itu sangat subjektif, dan dapat dikatakan subjektif bila disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang. Untuk itu kriteria kepastian atau objektif ini tidak menekankan pada orangnya tetapi pada datanya.

Sebagai alat analisis perlunya menggunakan triangulasi data. Denzin (dalam Gunawan 2013:218) mengungkapkan keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu, dengan data yang didapat dari sumber atau metode lain. Konsep ini dilandasi dengan asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti, atau metode lainnya.

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu di lapangan. Kegiatan triangulasi mencakup proses pengujian hipotesis yang dibangun selama pengumpulan data. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Selanjutnya Denzin (dalam Gunawan 2013:219) membedakan ada empat macam triangulasi, yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Triangulasi sumber berarti membandingkan (mencek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan dengan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Metode

Suatu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Menurut Rahardjo (dalam Gunawan 2013:220) triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Untuk dapat memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu peneliti bisa menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan peneliti atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data tersebut harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

4. Triangulasi Teoritik

Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Pada teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dimana peneliti menggali kebenaran informasi dari berbagai sumber yang di temui peneliti dengan kriteria-kreteria tertentu kemudian mengecek ulang dengan yang ada dilapangan serta peneliti menggunakan metode-metode dalam melakukan wawancara dengan berbagai sumber yang mengetahui dan memahami tentang informasi yang dimaksud peneliti, juga melakukan observasi dan survei langsung ke lapangan.

3.6 Analisis Data

Pandangan Miles dan Huberman (1992:15) mengenai analisis data kualitatif pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

Dalam pandangan Miles dan Huberman (1992:16) menganggap bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3.6.1 Reduksi Data

Alur penting pertama dari kegiatan analisis data ialah reduksi data. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semua merupakan pilihan-pilihan analisis.

Miles dan Huberman (1992:16) mengartikan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan “reduksi data” kita tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti disini merupakan data-data yang didapat pada saat penelitian baik berupa wawancara, tulisan-tulisan catatan, maupun data-data yang diperoleh pada KPH Banyuwangi Utara yang selanjutnya dipilih dan digolongkan mana yang dianggap perlu dan penting untuk digunakan dalam penelitian yang diteliti.

3.6.2 Penyajian Data

Alur penting kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis.

Miles dan Huberman (1992:17) membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian, Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian tersebut meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Setelah melalui tahapan reduksi data maka selanjutnya peneliti menyajikan data-data yang telah seleksi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun berbagai jenis gambar, tabel, grafik, matriks yang telah tersusun dan mendukung dalam penelitian yang dilakukan.

3.6.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan menganalisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Penarikan kesimpulan menurut pandangan Miles dan Huberman (1992:19) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga. Dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

Setelah melalui tahapan reduksi data dan penyajian data maka peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan diambil setelah melakukan tinjauan ulang pada semua data-data yang tersaji dan juga data dari catatan-catatan di lapangan serta berfikir secara seksama untuk menarik kesimpulan yaitu inti dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Strategi penerapan sistem pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC dilakukan pada periode 2010-2015 berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang kurun waktu lima tahun.
2. KPH Banyuwangi Utara menerapkan strategi system pengelolaan hutan lestari sesuai dengan standar pengelolaan FSC. System pengelolaan hutan lestari standar FSC meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi kelola kelestarian produksi, fungsi kelola kelestarian sosial, dan fungsi kelola kelestarian lingkungan.
3. Fungsi kelola kelestarian sosial menjadi yang paling dominan sekaligus menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan secara lestari.
4. Untuk mencapai keberhasilannya dalam mewujudkan hutan lestari maka KPH Banyuwangi Utara melakukan cara-cara sebagai berikut.
 4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan.
 5. Adanya konsistensi antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.
 6. Adanya komunikasi yang baik antara KPH Banyuwangi Utara dengan masyarakat.

5.2 Saran

KPH Banyuwangi Utara dalam mewujudkan kelestarian hutannya tentu saja tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat desa sekitar hutan. Maka sekiranya ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut.

1. Perlunya memperluas lapangan kerja dalam perusahaan hutan yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan terlibat. Hal ini dilakukan mengurangi tingkat pengangguran sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan.
2. Akses jalan menuju kawasan hutan supaya dipermudah. Hal tersebut memberikan manfaat kepada KPH Banyuwangi Utara dalam melaksanakan monitoring juga pengelolaannya serta memudahkan masyarakat pula dalam menjangkau kawasan hutan.

Daftar Pustaka

- Adi, R. 2012. *Intervensi Masyarakat & Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cribbin, J. 1990. *Kepemimpinan Mengefektifkan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Djoko,S.2009. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, I, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat,W. 2005. *Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: Cipta Mandiri.
- Huberman, M, A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kartono, K. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, P. A. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mangkuprawira, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J, L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J, L. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamulardi,B. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Puspitosari, H., Kehutanan*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Udaya, J. 1994. *Teori Organisasi Struktur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

- Rulliaty, Muslich, Effendi, Widiarti, Sumarhani, Murniati, Irawanti, Hakim. 2010. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Siagian, P, S. 1986. *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung/ CV Haji Masagung.
- Siagian, P, S. 1999. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sondang, S. 2004. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suhardi,dkk. 2002. *Hutan Dan Kebun Sebagai Sumber Pangan Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoha, M. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

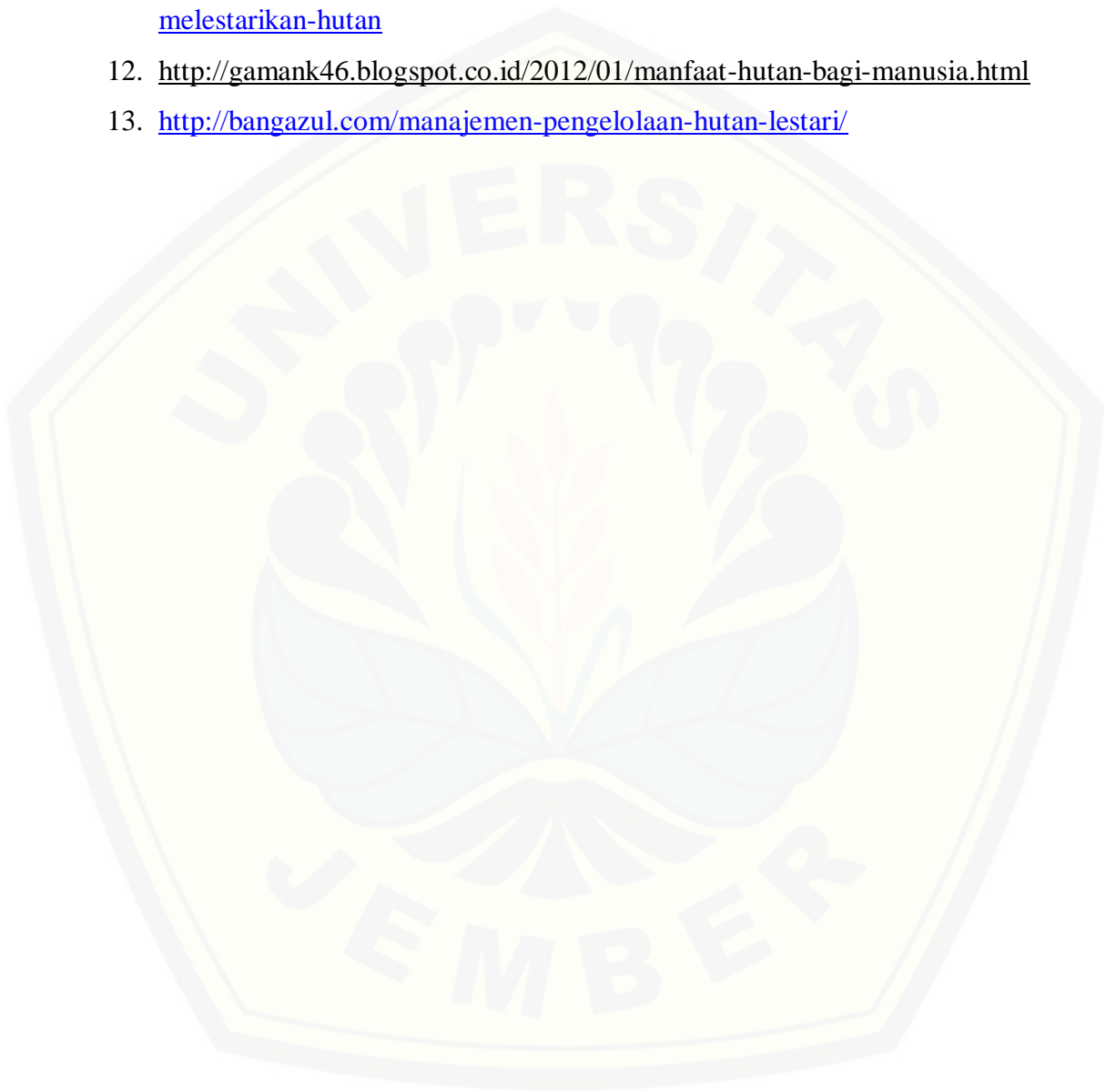
Undang-Undang

- Undang-Undang Republik [Indonesia](#) No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Tentang Pedoman Standar Pelayanan Nomor 15 Tahun 2014

Internet

1. Banyuwangikab.go.id
2. Kphbanyuwangiutara.com
3. Wikipedia.org
4. Dephut.go.id
5. Perumperhutani.com
6. Cifor.org
7. www.academia.edu
8. Dishut.jatimprov.go.id

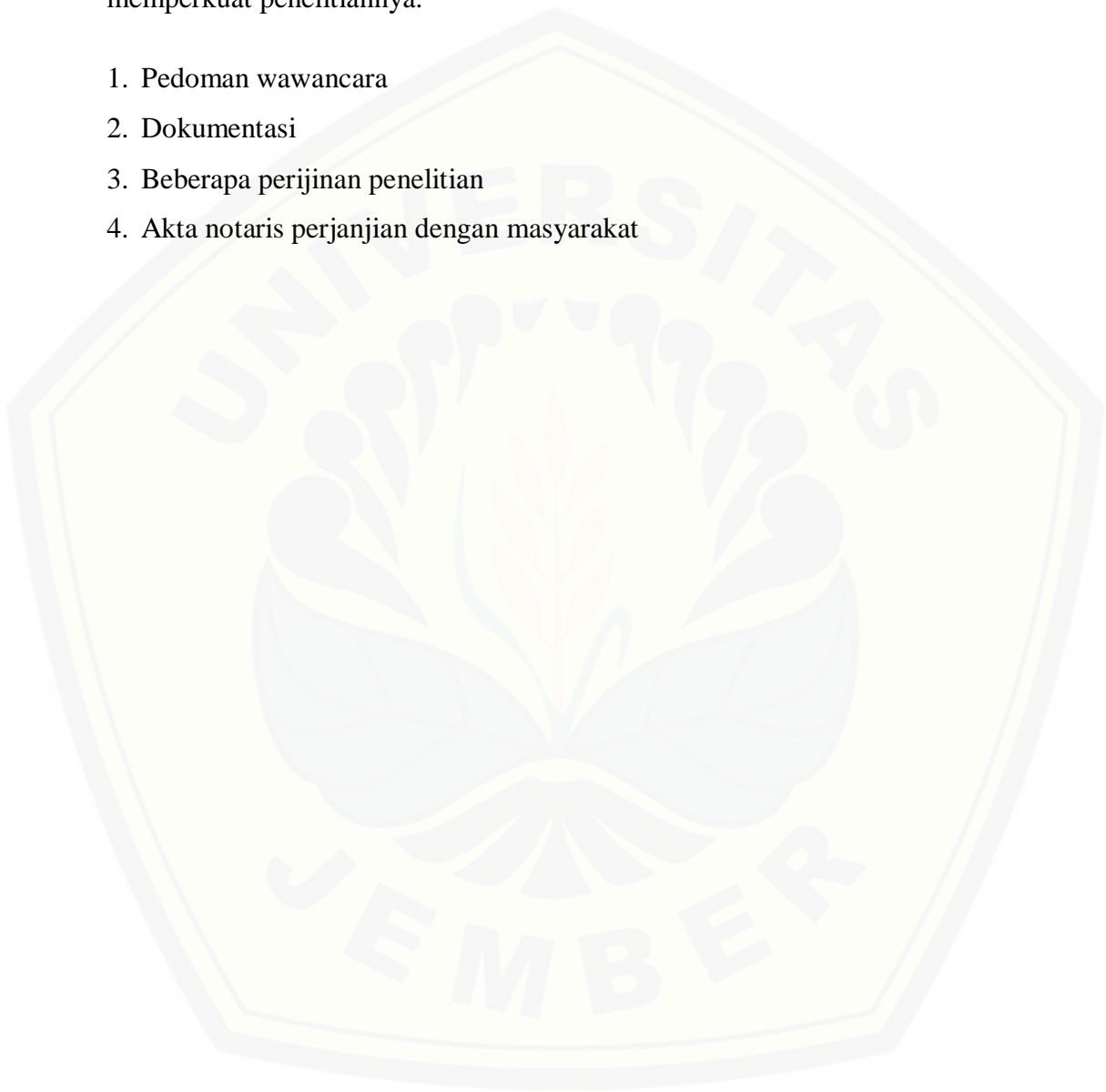
9. Oprasionalisasi Strategi oleh Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini dalam Google Book
10. <http://sadar-hutanku.blogspot.co.id/p/manfaat-hutan-bagi-manusia.html>
11. <http://www.hijauku.com/2013/03/28/lima-manfaat-menanam-pohon-dan-melestarikan-hutan>
12. <http://gamank46.blogspot.co.id/2012/01/manfaat-hutan-bagi-manusia.html>
13. <http://bangazul.com/manajemen-pengelolaan-hutan-lestari/>



LAMPIRAN

Berikut peneliti lampirkan beberapa data yang peneliti gunakan dalam memperkuat penelitiannya.

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi
3. Beberapa perijinan penelitian
4. Akta notaris perjanjian dengan masyarakat



Pedoman Wawancara

ORGANISASI

1. Bagaimana struktur organisasi di perhutani utara dan apakah ada bedanya dengan organisasi yang menangani hutan lestari?
2. Apakah pengelolaan hutan memiliki komitmen untuk kelestarian?
3. Apakah kondisi hutan dan para penggunanya dapat diterima?
4. Apakah respon terhadap intervensi pengelolaan positif?
5. Pengelolaan hutan lestari sangat erat kaitannya dengan fungsi Perencanaan, Tidakan, Pengawasan dan Supervisi. Apakah kebijakan yang diterapkan KPH sudah meliputi beberapa hal tersebut diatas?
6. Apakah ada cara-cara yang efektif dalam koordinasi antarlembaga dalam hal tata guna lahan dan pengelolaan lahan?
7. Apakah ada kawasan hutan permanen yang merupakan basis pengelolaan hutan lestari, yang mencakup hutan lindung dan hutan produksi, dan dilindungi oleh undang-undang?
8. Apakah para karyawan mendapat pelatihan yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan? Dimana?

SOSIAL

1. Seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kontribusinya untuk pengelolaan hutan yang sesuai dengan regulasi yang ada? (misal; masyarakat terlibat aktif dalam usaha pencegahan illegal logging, penanganan bibit yang tumbuh liar, etc.)
2. Apakah mungkin adanya konflik-konflik yang timbul dengan masyarakat? Bila ada, bagaimana cara-cara untuk mengatasi konflik berfungsi baik tanpa menggunakan kekerasan?
3. Adanya kesempatan bagi masyarakat lokal dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan untuk memperoleh pekerjaan dari

perusahaan-perusahaan kehutanan, bagaimana mekanisme distribusi manfaat dianggap adil oleh masyarakat lokal?

4. Apakah Masyarakat ikut serta dalam menanamkan modal di lingkungannya (misalnya, waktu, tenaga, uang)?
5. Adakah dokumen bukti-bukti kesepakatan dengan masyarakat lokal tentang tempat-tempat di mana pihak pengelola hutan dapat melakukan kegiatannya?

LINGKUNGAN

1. Adakah hubungan antara kerusakan hutan dengan tumpangsari warga di hutan?
2. Bagaimana dengan kerusakan terhadap tegakan sisa pemanenan? Apakah perlu rehabilitasi lahan dan hutan yang terkena dampak dilakukan?

EKONOMI

1. Apakah dana untuk pengelolaan hutan selalu tersedia dan dalam jumlah yang memadai, dari manakah dana tersebut berasal? Berapa anggarannya?(minta data)
2. Adakah dana cadangan untuk mengatasi kerusakan yang mungkin terjadi?
3. Adakah hak untuk memungut hasil hutan nonkayu (HHNK) (misalnya, kayubakar)?
4. Bagaimana sistem pemanenan dan peralatannya diterapkan sesuai dengan kondisi hutan untuk mengurangi dampak/pengaruhnya?

HUTAN LESTARI

Bagaimana pengelolaannya??strategi apa yang dilakukan?

Jangka panjang tujuan manajemen, dan cara mencapainya, harus dinyatakan secara jelas.

1. Bagaimana dengan penataan areal kerja.
2. Bagaimana dengan ketersediaan bibit.
3. Bagaimana dengan kontrol terhadap pemanenan hutan
4. Bagaimana dengan ketersediaan pasar (market) yang jelas.
5. Bagaimana dengan ketersediaan prosedur dan implementasi pengendalian kebakaran hutan.

6. Adakah hasil hutan yang dikelola langsung oleh masyarakat,ex: madu
7. Macam hasil hutan non kayu

Kriteria Sosial

1. Bagaimana dengan mekanisme solusi konflik sosial.
2. Bagaimana dengan mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan tanaman.
3. Bagaimana dengan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Batas Kewenangan

1. Apakah KPH Banyuwangi utara diberi wewenang untuk membentuk strategi sendiri atau mengimplementasikan dari pusat?
2. Apakah itu bentuk strategi atau sejenis teknik dalam pencapaian tujuan?
3. Apakah strategi tersebut tertuang dalam renstra?

DOKUMENTASI



Pos kawasan hutan BKPH Bajul Mati



Pos BKPH Bajul Mati



Benih Persemaian



Lokasi kebun pangkas



Pemangkasan metode stek pucuk



Proses metode stek pucuk



Foto bersama masyarakat stek pucuk



Tempat bakal benih baru



Menjaga kelembapan benih



Persemaian benih



Tanaman tumpang sari



Hasil produksi kayu jati bundar



Papan larangan merusak ekosistem sungai



Mengukur kualitas air



Penampungan air



Kawasan rimba



Patroli hutan



Staf KPH Banyuwangi Utara



Certificate SGS-FM-COC-009825

The management system of

Perum Perhutani – KPH Banyuwangi Utara

Jl. Jaksa Agung Suprpto 34 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia



has been assessed and certified as meeting the requirements of a well managed forest

Forest Management

The company was assessed against the following standard
SGS Forest Management Standard (AD33) adapted for Indonesia, version 3 of 17.09.2010.

For the following activities

**Forest Management of plantations in the KPH Banyuwangi of the East
District of Java Island, Indonesia for the production of hardwood timber**

This certificate is valid from 3 April 2013 until 2 April 2018

Issue 1. Certified since April 2013

SGS Ref # ID13/02365

Authorised by

SGS South Africa (Pty) Ltd, Qualifor Programme
PO Box 82582 Southdale 2135, 58 Melvill Street Booyens Johannesburg 2091 South Africa
t +27 (0) 11 681-2537 f +27 (0) 11 681-2543 <http://www.sgs.com/en/Agriculture-Food/Forestry/>



The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/>
For the full list of product groups covered by the certificate see <http://info.fsc.org/>
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents
This certificate remains the property of SGS and shall be returned upon request.

The mark of
responsible forestry

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Clients/Directories/Certified-Clients-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



PERHUTANI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 206/16.8/SDM/Bwu/Divre-Jatim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a : **FADJAR ZULKARNAIN**
- NPK : PHT19611106199209100
- Jabatan : Kepala Tata Usaha
KPH Banyuwangi Utara.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut dibawah ini :

- N a m a : **INDAH CITRA PURNAMA**
- NIM : 100910201025
- Program Study : Administrasi Negara
- Jurusan : Ilmu Administrasi

Telah melakukan Penelitian pada wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul "STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI BERBASIS MASYARAKAT" yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 sesuai Surat Ijin Kepala Divisi Regional Jawa Timur Nomor: 49/016.5/Sekdivre-Jatim tanggal 30 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Nomor : 072/ 173 /REKOM/429.204/2016
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Banyuwangi, 19 Februari 2016
Kepada :
Yth. Adm. Perhutani Banyuwangi Utara

Di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
Tanggal : 11 Februari 2016
Nomor : 366/UN.25.1.2/LT/2016
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada
Nama : **INDAH CITRA PURNAMA**
NIM : **100910201025**

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Strategi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara
Dalam Mewujudkan Hutan Lestari

Tempat : Perhutani Banyuwangi Utara

Waktu : 19 Februari s/d 19 April 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan
Kebangsaan



Drs. TRIWIDODO, M.Si

Pangkat Tingkat I

NIP. 19601014 199103 1 007

Tembusan :

Yth. Ketua Lembaga Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 222/UN25.1.2/LT/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

20 Januari 2015

Yth. Kepala Biro SDM, Umum dan Sarpra
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
Di Surabaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ingin menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenalkan mahasiswa kami :

Nama : Indah Citra Purnama
NIM : 100910201025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Kabupaten Banyuwangi dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara, Perum Perhutani Unit II Propinsi Jawa Timur) ".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 196108281992011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : **168** /UN25.3.1/LT/2016
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
 Penelitian

11 Februari 2016

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
 Perlindungan Masyarakat
 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
 di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 366/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 05 Februari 2016, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Indah Citra Purnama/100910201025
 Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Negara Universitas Jember
 Alamat / HP : Jl. Brantas Raya No. 237A Jember/Hp. 081379652600
 Judul Penelitian : Strategi Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Utara
 Dalam Mewujudkan Hutan Lestari
 Lokasi Penelitian : Perum Perhutani Kabupaten Banyuwangi
 Lama Penelitian : Dua bulan (11 Februari 2016 – 11 April 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mencari data sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 366/UN25.1.2/LT/2016
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

5 Pebruari 2016

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenalkan mahasiswa kami :

Nama : Indah Citra Purnama
NIM : 100910201025
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Strategi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara dalam Mewujudkan Hutan Lestari ".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Dr. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.

NIP 19610828 199201 1 001

FROM : BIRD SBKNIT UNIT II

FAX NO. : 031 5474313

2 Feb. 2015 11:53 P1



PERHUTANI

Nomor : 49/016.5/Sekdivre/Jatin
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Surabaya, 30 Januari 2015

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto
 Di - JEMBER

Menarik surat Saudara nomor 222/un25.1.2/lt/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui ijin mahasiswa Saudara, a.n. :

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | Indah Citra Purnama | 100910201025 | Ilmu Administrasi Negara |

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada satuan kerja KPH Banyuwangi Utara dengan judul "**Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di KPH Banyuwangi Utara, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur)**".

2. Segala biaya, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
4. Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan : KPH Banyuwangi Utara Jl. Jaksu Agung Suprpto No. 34 Banyuwangi, Telp. (0333) - 421794, Fax. (0333) - 421649.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan Kepada Yth.
 - Administratur/KKPH Banyuwangi Utara.



FROM: PERHUTANI KPH BJU

FAX NO. : 0333411265

12 Jan. 2015 8:30PM P1



PERHUTANI

Banyuwangi, 27 DEC 2014

Nomor : 935 /045.8/SDM/Bwu/2014
 Lampiran : 1 (satu) Buku.
 Perihal : Permohonan Ijin penelitian.

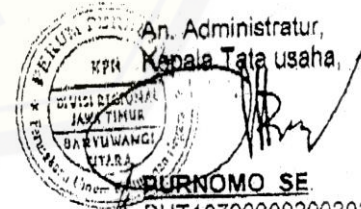
Kepada Yth :

Kepala Dekan Universitas Jember
 Jln. Kalimantan _ Kampus Tegalbota
 Di -
JEMBER.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 09 Desember 2014 Nomor: 4328/UN25.1.2/LT/2014 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa untuk ijin melaksanakan penelitian pada wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur ijin diberikan oleh pimpinan di Divisi Regional Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ijin untuk melakukan penelitian agar disampaikan kepada kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Jln. Genteng Kali No. 49 Surabaya.

Demikian untuk menjadikan maklum.



An. Administratur,
 Kepala Tata usaha,

BURNOMO SE.
 PHT197009082002021

Tembusan Kepada Yth :

Kepala Biro SDM, Umum & Sarpra
 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
 Di -
SURABAYA.